

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**  
(Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 –  
2018)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh

**Ridho Rachman**

NIM 11150150000079

**PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

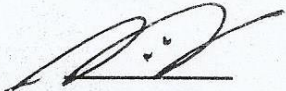


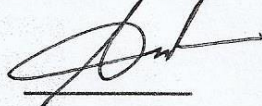
**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

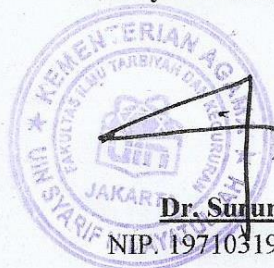
Skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)” oleh Ridho Rachman, NIM 11150150000079, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqosah pada tanggal 20 Januari 2020 dihadapan dewan penguji. Karena itu penulis berhak memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial.

Jakarta, 20 Januari 2020

### Panitia Ujian Munaqosah

	Tanggal	Tanda Tangan
<b>Ketua Sidang (Kepala Prodi Tadris IPS)</b> <b><u>Dr. Iwan Purwanto, M.Pd.</u></b> NIP. 19730424 2008011 012	22/1/20	
<b>Sekretaris Sidang (Sekprodi Tadris IPS)</b> <b><u>Andri Noor Ardiansyah, M.Si.</u></b> NIP. 19840312 201503 1 002	22/1/20	
<b>Dosen Penguji I</b> <b><u>Dr. Iwan Purwanto, M.Pd.</u></b> NIP. 19730424 2008011 012	22/1/20	
<b>Dosen Penguji II</b> <b><u>Andri Noor Ardiansyah, M.Si.</u></b> NIP. 19840312 201503 1 002	22-01/20	

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



**Dr. Sururin, M.Ag.**  
NIP. 19710319 199803 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan  
Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 –  
2018)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Ridho Rachman**

NIM 11150150000079

Yang Mengesahkan

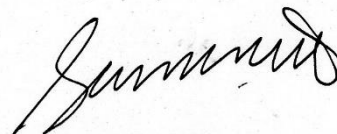
Pembimbing Skripsi I



**Neng Sri Nuraeni, M.Pd.**

NIDN. 2005058801

Pembimbing Skripsi II



**Dr. Sodikin, M.Si.**

NIDN. 2022028704

**PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA**

**2019**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)**” disusun oleh Ridho Rachman, NIM 11150150000079, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Telah melalui bimbingan dan telah dinyatakan sah sebagai karya tulis ilmiah yang berhak untuk diujikan pada sidang munaqosah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Jakarta, 13 September 2019

Yang Mengesahkan

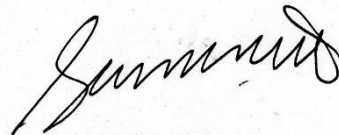
Pembimbing Skripsi I



**Neng Sri Nuraeni, M.Pd.**

NIDN. 2005058801

Pembimbing Skripsi II



**Dr. Sodikin, M.Si.**

NIDN. 2022028704

## LEMBAR PERNYATAAN UJI REFERENSI

Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)**” yang disusun oleh Ridho Rachman, NIM 11150150000079, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 14 Agustus 2019.

Jakarta, 13 Agustus 2019

Yang Mengesahkan

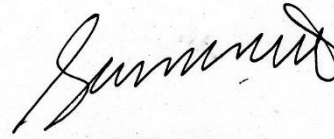
Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



**Neng Sri Nuraeni, M.Pd.**

NIDN. 2005058801



**Dr. Sodikin, M.Si.**

NIDN. 2022028704

## SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Rachman  
NIM : 11150150000079  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Jurusan/ Prodi : Pendidikan IPS / Konsentrasi Ekonomi  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)**  
Dosen Pembimbing : 1. Neng Sri Nuraeni, M.Pd.  
2. Dr. Sodikin, M.Si.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 13 Agustus 2019



Ridho Rachman  
NIM 11150150000079

## ABSTRAK

**Ridho Rachman (NIM 11150150000079). Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)”.**

Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. (2) untuk mengetahui rasio efisiensi APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. (3) untuk mengetahui kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan sampel berupa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran dan laporan pertumbuhan ekonomi dengan harga konstan berdasarkan lapangan usahanya dari tahun 2011 – 2018. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa: (1) rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. (2) rasio efisiensi APBD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan, dan (3) kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan PAD secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan.

**Kata Kunci: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi APBD, Pertumbuhan Ekonomi.**

## **ABSTRACT**

***Ridho Rachman (NIM 11150150000079). Department of Social Sciences Education, Faculty of Tarbiyah Science and Teaching. “Analysis of the Influence of Regional Financial Performance on Economic Growth (Case Study in the Government of Tangerang Selatan City year 2011 – 2018)”.***

*The aims of this research were (1) to know PAD effectivity ratio influencing the economic growth of Tangerang Selatan city, (2) to know APBD efficiency ratio influencing the economic growth of Tangerang Selatan city, (3) to know regional financial performance consisted of PAD effectivity ratio and APBD efficiency ratio influencing the economic growth of Tangerang Selatan city. The sample of this research was Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) or Finance and Asset Management Agency Region of Tangerang Selatan city. The technique of data collection was using documentation of budget of realization report and economic growth report at constant price based on the field of bussiness year 2011–2018. The applied technique of data analysis for answering the hypothesis was multiple linier regression.*

*The results of the research showed that: (1) PAD effectivity ratio positive influenced the economic growth of Tangerang Selatan city, (2) APBD efficiency ratio negative influenced the economic growth of Tangerang Selatan city, and (3) regional financial performance consisted of PAD effectivity ratio and APBD efficiency ratio simultaneously influenced the economic growth of Tangerang Selatan city.*

***Keywords:*** PAD Effectivity ratio, APBD efficiency ratio, economic growth.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta seluruh muslimin dan muslimat.

Skripsi ini penulis ajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan (S.Pd.). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Amany Burhanudin Umar Lubis, Lc. MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Sururin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Iwan Purwanto, M.Pd., selaku Kepala Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah tulus dan ikhlas memberikan dan melayani penulis selama penulis berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Andri Noor Ardiansyah, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah tulus dan ikhlas memberikan dan melayani penulis selama penulis berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Dr. H. Nurochim, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Neng Sri Nuraeni, M.Pd., dan Dr. Sodikin, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi I dan II. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi selama penulis menyusun skripsi.
7. Seluruh Dosen Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta

bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan, semoga ilmu yang telah disampaikan Bapak atau Ibu berikan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

8. Ibu Else Dwi Listiani, S.Si., M.Si, selaku Kasi Pelaporan Akuntansi yang telah memberikan izin dan memberikan data kepada penulis untuk melakukan penelitian di BPKAD Kota Tangerang Selatan.
9. Teristimewa kepada kedua orangtuaku, Bapak Baesuni Rahman dan Ibu Mardiyatun yang telah membesarkan dan mengajarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas semua cinta yang terpancar, do'a dan restu yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas dukungan berupa moril dan materil yang luar biasa selalu kalian berikan dan nomor satukan ditengah kesibukan kalian untuk penulis.
10. Kakak tersayang dan suami, Rini Susanti dan Noerdyansyah beserta anaknya Zaflan Alif Alfaiz yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Partner terbaik Asti Nurmala yang telah banyak membantu, memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Syarif, Mul, Dian, Yunita, dan Mia yang telah kebersamai selama perkuliahan.
13. Rekan-rekan staff dan pengajar di bimbingan belajar BTA Group yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Kepengurusan Kopma UIN Syahid Jakarta periode 2017 dan 2018 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2015 FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya konsentrasi Ekonomi yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa persahabatan kita, tetap kompak selalu, saling mengingatkan, dan terus jalin silaturahmi.

16. Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) DOREMI 123 Tahun 2018, terimakasih atas dukungan serta motivasinya, semoga tetap kompak selalu.
17. Kelompok Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) SMA Negeri 29 Jakarta Tahun 2019, terimakasih atas dukungan serta motivasinya, semoga tetap kompak selalu, dan
18. Semua pihak yang telah membantu berkontribusi, menginspirasi, dan memotivasi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas bantuan mereka yang sangat berharga, penulis berdo'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda sebagai amal shaleh dan ketaatan kepada-Nya. Aamiin.

Jakarta, 14 Agustus 2019

Ridho Rachman

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN UJI REFERENSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Deskripsi Teoritik.....	14
1. Kinerja Keuangan Daerah .....	14
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	26
B. Penelitian yang Relevan.....	35
C. Kerangka Berpikir .....	39
D. Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
1. Tempat Penelitian.....	42

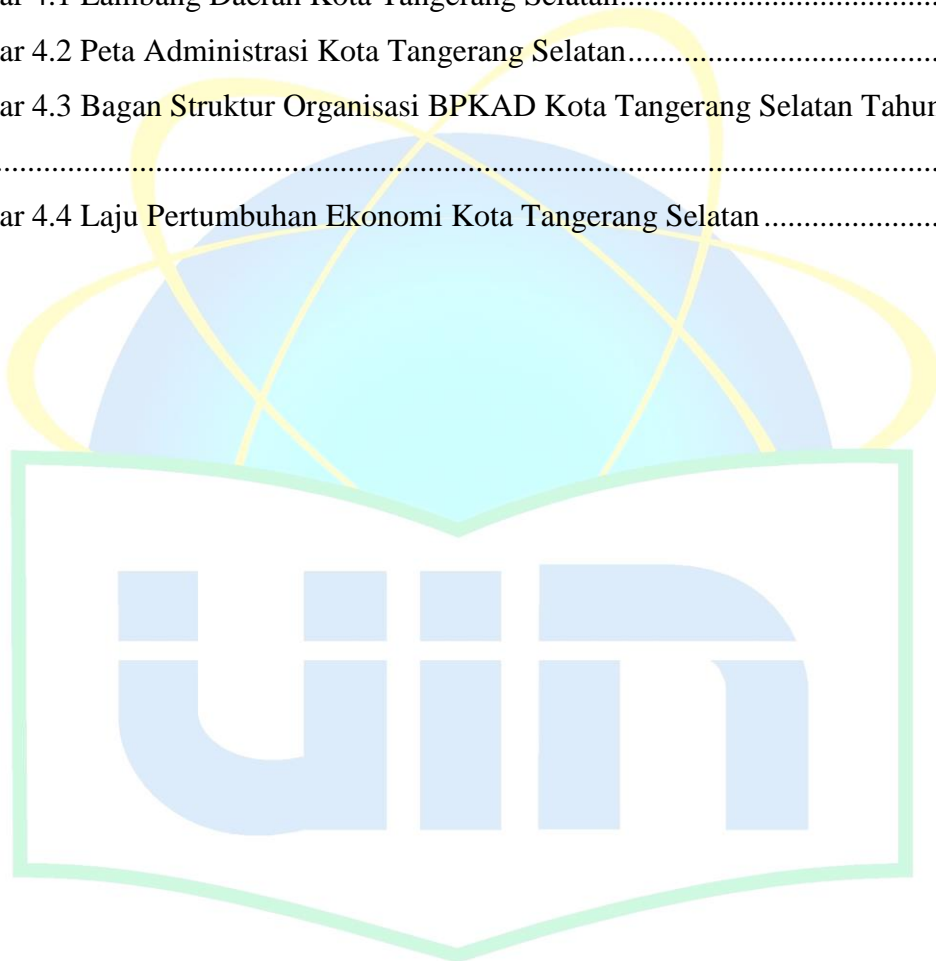
2.	Waktu Penelitian .....	42
B.	Metode Penelitian .....	43
C.	Populasi dan Sampel .....	44
D.	Sumber Data .....	44
E.	Variabel Penelitian dan Definisi Variabel .....	45
1.	Variabel Penelitian .....	45
2.	Definisi Variabel .....	46
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
G.	Instrumen Penelitian.....	49
H.	Teknik Pengolahan Data .....	49
1.	Statistik Deskriptif .....	49
2.	Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	50
3.	Uji Asumsi Klasik.....	51
4.	Uji Regresi.....	53
5.	Uji Hipotesis.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>56</b>
A.	Hasil Penelitian.....	56
1.	Data Umum .....	56
2.	Data Khusus.....	63
3.	Analisis Data .....	69
4.	Statistik Deksriptif Data Penelitian .....	71
5.	Pengujian Prasyarat Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	72
B.	Pembahasan .....	81
1.	Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan.....	81
2.	Pengaruh Rasio Efisiensi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan.....	82
3.	Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan.....	83
C.	Keterbatasan Penelitian.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>85</b>
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Implikasi.....	85

<b>C. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2017.....	9
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 3.1 Tempat Penelitian.....	42
Gambar 3.2 Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y.....	45
Gambar 4.1 Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan.....	56
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan.....	59
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016.....	63
Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan.....	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komponen Pendapatan Daerah Per Provinsi .....	4
Tabel 1.2 Tingkat Pertumbuhan PAD Kota Tangerang Selatan .....	5
Tabel 1.3 Alokasi Belanja Kota Tangerang Selatan .....	7
Tabel 1.4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang Selatan.....	8
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	20
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah .....	22
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah .....	23
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah.....	23
Tabel 2.5 Penelitian yang Relevan.....	35
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	43
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah .....	50
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah.....	50
Tabel 3.4 Kriteria Pengujian Autokorelasi.....	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017 .....	60
Tabel 4.2 LRA Tahun Anggaran 2011.....	64
Tabel 4.3 LRA Tahun Anggaran 2012.....	64
Tabel 4.4 LRA Tahun Anggaran 2013.....	65
Tabel 4.5 LRA Tahun Anggaran 2014.....	65
Tabel 4.6 LRA Tahun Anggaran 2015.....	66
Tabel 4.7 LRA Tahun Anggaran 2016.....	66
Tabel 4.8 LRA Tahun Anggaran 2017.....	67
Tabel 4.9 LRA Tahun Anggaran 2018.....	68
Tabel 4.10 Pertumbuhan Ekonomi 2011 – 2018.....	68
Tabel 4.11 Penghitungan Rasio Efektivitas .....	70
Tabel 4.12 Penghitungan Rasio Efisiensi APBD.....	70
Tabel 4.13 Hasil Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas .....	73
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas .....	74
Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	75

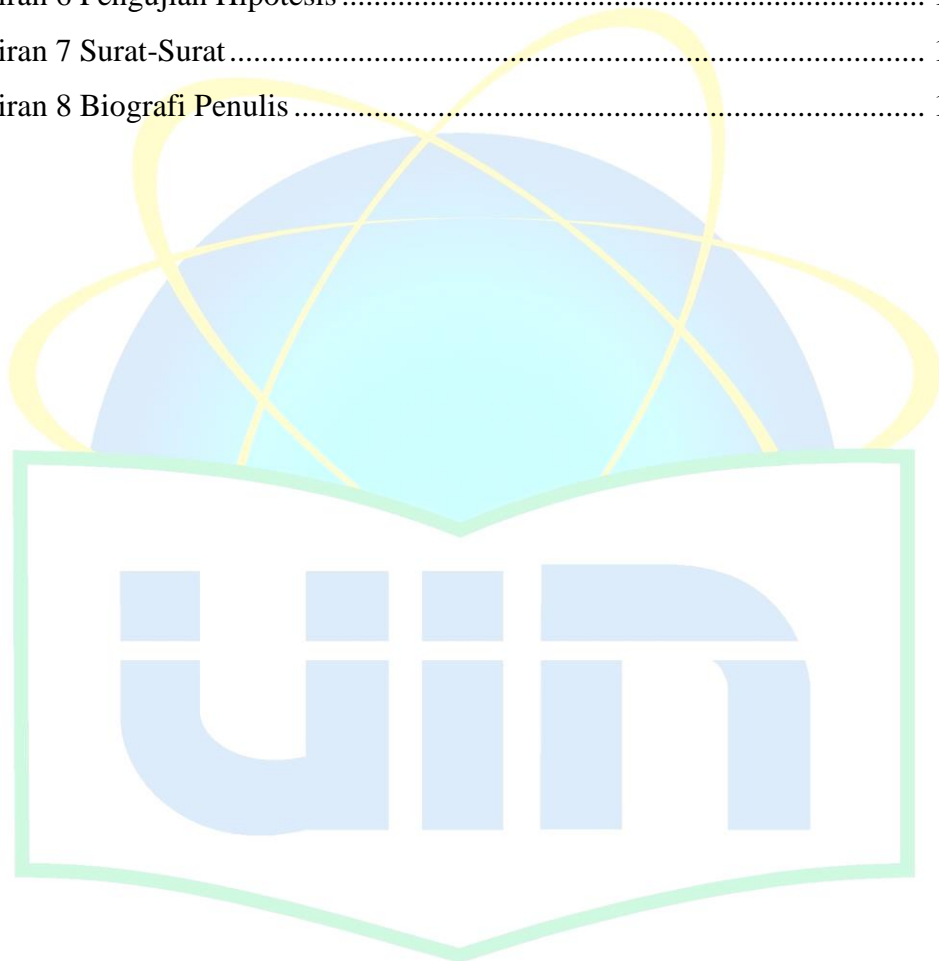


Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi .....	75
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	76
Tabel 4.19 Hasil Uji F Simultan .....	79
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	80
Tabel 4.21 Tabel R Square $X_1$ .....	80
Tabel 4.22 Tabel R Square $X_2$ .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Referensi.....	94
Lampiran 2 Data Dokumentasi .....	98
Lampiran 3 Analisis Data Khusus.....	104
Lampiran 4 Statistik Deskriptif Data Penelitian .....	104
Lampiran 5 Pengujian Prasyarat Analisis .....	105
Lampiran 6 Pengujian Hipotesis .....	106
Lampiran 7 Surat-Surat .....	107
Lampiran 8 Biografi Penulis .....	111



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sudah 74 tahun merdeka, dimulai dari era kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga era reformasi. Sudah dua puluh tahun lebih, masa reformasi berlangsung di Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi ketika perubahan kepemimpinan saat itu dari masa orde baru hingga ke masa reformasi yang terjadi di tahun 1998 lalu. Perubahan itu seperti adanya kebebasan berpendapat, hingga diubah sistem Pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi.

Desentralisasi atau otonomi daerah sendiri mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 1999, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat bertanggung jawab terhadap daerah yang dipimpinnya, dapat mengoptimalkan pembangunan-pembangunan di daerahnya masing-masing dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

*“Menurut Nahmiati dalam Fathah Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagai subsistem Pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Rigel Nurul Fathah, *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*, Jurnal EBBANK, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, STIE B Bank Yogyakarta, h. 33 - 34

Dalam menjalankan otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki haknya yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 21 – 23, yang salah satunya terdapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya, mengelola kekayaan negara, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari badan usaha yang berusaha di daerahnya.<sup>2</sup> Hal tersebut sejalan dengan konsep dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan anggaran yang akan diterima selama satu tahun dan anggaran yang akan dikeluarkan selama satu tahun fiskal. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran tersebut tertuang pada APBD. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab IV tentang Penyusunan dan Penetapan APBD Pasal 16 menyatakan bahwa

*“APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, APBD sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.”*<sup>3</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mampu mengurangi pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan konsep dari *value for Money* dimana menurut

---

<sup>2</sup> Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 21-23, h. 22-23

<sup>3</sup> Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 16, h. 9

<sup>4</sup> Diah Nurdiwaty, dan Badruz Zaman, *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri*, Jurnal Ekonomika Bisnis, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 32

Mardiasmo dalam Renyowijoyo menyatakan bahwa organisasi sektor public harus memperhatikan konsep ini. Konsep *value for Money* ini merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.<sup>5</sup>

Kinerja keuangan daerah ini diperlukan karena dapat melihat kesuksesan suatu daerah dalam melaksanakan pekerjaannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahqaf [46]: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”

Dari ayat di atas, terlihat bahwa Allah SWT akan membalas setiap amalan yang dilakukan oleh masing-masing manusia. Sehingga, jika kalau dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah, adalah jika daerah tersebut dapat melaksanakan dengan baik manajemen keuangannya, maka daerah tersebut akan mendapatkan hasil yang baik juga.

Sejauh ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam hal desentralisasi atau otonomi daerah ini, seperti belum optimalnya penerimaan yang diperoleh oleh masing-masing daerah, pasalnya menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 10 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di daerahnya masing-masing, tetapi kenyataannya lebih dari 79% atau setara dengan 24 Provinsi di Indonesia masih belum mandiri dalam hal pendapatannya.<sup>6</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode April 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1

<sup>5</sup> Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 4

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2017*, artikel diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.54 WIB dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666>

**Tabel 1.1 Komponen Pendapatan Daerah Per Provinsi**

N	Provinsi	PAD	Dana Perimbangan	Selisih
1	Prov. Aceh	Rp 2,227,055,653,755	Rp 3,741,189,009,600	-Rp 1,514,133,355,845
2	Prov. Sumatera Utara	Rp 4,925,627,725,733	Rp 7,235,420,477,680	-Rp 2,309,792,751,947
3	Prov. Sumatera Barat	Rp 2,044,504,493,000	Rp 3,990,886,148,502	-Rp 1,946,381,655,502
4	Prov. Riau	Rp 3,735,800,000,000	Rp 5,120,242,595,981	-Rp 1,384,442,595,981
5	Prov. Jambi	Rp 1,393,072,790,798	Rp 2,766,192,134,604	-Rp 1,373,119,343,806
6	Prov. Sumatera Selatan	Rp 3,016,085,362,904	Rp 5,175,402,210,000	-Rp 2,159,316,847,096
7	Prov. Bengkulu	Rp 905,536,548,769	Rp 2,132,917,440,228	-Rp 1,227,380,891,460
8	Prov. Lampung	Rp 2,649,215,474,000	Rp 4,031,511,697,614	-Rp 1,382,296,223,614
9	Prov. DKI Jakarta	Rp 41,488,193,370,554	Rp 18,770,211,233,000	Rp 22,717,982,137,554
10	Prov. Jawa Barat	Rp 16,524,120,917,766	Rp 13,987,089,323,786	Rp 2,537,031,593,980
11	Prov. Jawa Tengah	Rp 11,967,160,406,000	Rp 11,414,817,176,000	Rp 552,343,230,000
12	Prov. DI Yogyakarta	Rp 1,657,147,882,129	Rp 2,461,741,043,739	-Rp 804,593,161,610
13	Prov. Jawa Timur	Rp 14,900,003,388,123	Rp 13,025,490,926,000	Rp 1,874,512,462,123
14	Prov. Kalimantan Barat	Rp 1,674,190,144,000	Rp 3,413,705,136,000	-Rp 1,739,514,992,000
15	Prov. Kalimantan Tengah	Rp 1,327,494,134,000	Rp 2,615,492,050,226	-Rp 1,287,997,916,226
16	Prov. Kalimantan Selatan	Rp 3,205,743,749,000	Rp 2,261,014,391,000	Rp 944,729,358,000
17	Prov. Kalimantan Timur	Rp 3,987,452,610,000	Rp 4,092,045,390,000	-Rp 104,592,780,000
18	Prov. Sulawesi Utara	Rp 1,076,342,496,000	Rp 2,429,190,571,000	-Rp 1,352,848,075,000
19	Prov. Sulawesi Tengah	Rp 914,431,692,350	Rp 2,646,828,119,800	-Rp 1,732,396,427,450
20	Prov. Sulawesi Selatan	Rp 3,724,172,762,535	Rp 5,158,708,141,000	-Rp 1,434,535,378,465
21	Prov. Sulawesi Tenggara	Rp 743,891,514,197	Rp 2,748,755,754,146	-Rp 2,004,864,239,949
22	Prov. Bali	Rp 3,250,531,000,000	Rp 2,673,596,252,308	Rp 576,934,747,692
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	Rp 1,501,611,335,359	Rp 3,222,521,202,310	-Rp 1,720,909,866,951
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	Rp 1,004,044,139,304	Rp 3,700,529,340,696	-Rp 2,696,485,201,392
25	Prov. Maluku	Rp 519,252,405,976	Rp 2,333,050,345,000	-Rp 1,813,797,939,024
26	Prov. Papua	Rp 1,308,280,585,796	Rp 4,419,279,187,000	-Rp 3,110,998,601,204
27	Prov. Maluku Utara	Rp 486,709,146,169	Rp 1,907,792,409,000	-Rp 1,421,083,262,831
28	Prov. Banten	Rp 5,666,689,017,551	Rp 4,118,564,461,000	Rp 1,548,124,556,551
29	Prov. Bangka Belitung	Rp 678,913,155,746	Rp 1,666,665,913,570	-Rp 987,752,757,824
30	Prov. Gorontalo	Rp 356,398,685,000	Rp 1,467,294,144,014	-Rp 1,110,895,459,014
31	Prov. Kepulauan Riau	Rp 1,104,344,658,037	Rp 2,096,085,459,062	-Rp 991,740,801,025
32	Prov. Papua Barat	Rp 403,269,106,650	Rp 3,196,319,386,190	-Rp 2,793,050,279,540
33	Prov. Sulawesi Barat	Rp 299,021,359,051	Rp 1,512,701,624,000	-Rp 1,213,680,264,950
34	Prov. Kalimantan Utara	Rp 419,868,015,909	Rp 1,800,696,737,000	-Rp 1,380,828,721,091

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Menurut Hamzah dalam Ani, menyatakan bahwa semakin besar porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan total, maka akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.<sup>7</sup> Selain itu, tingkat pertumbuhan PAD juga masih relatif lambat pertumbuhannya, seperti halnya yang dialami oleh Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tingkat

<sup>7</sup> Ni Luh Nana Putri Ani dan A. A.N.B. Dwirandra, *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*, Jurnal E-Jurnal Akuntansi Udayana 6.3, 2014, h. 490

pertumbuhan PAD kota tersebut dari tahun 2015 ke tahun 2016 turun sebesar 3% yang dapat dilihat pada Tabel 1.2<sup>8</sup>

**Tabel 1.2 Tingkat Pertumbuhan PAD Kota Tangerang Selatan**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan
2015	Rp 1,228,393,889,612	-3%
2016	Rp 1,196,706,114,000	

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Penurunan Pendapatan Asli Daerah ini terjadi karena terjadi penurunan pada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menyebabkan pertumbuhan PAD Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan sebesar 3%. Jika membahas mengenai laporan keuangan antara perusahaan dengan laporan keuangan pemerintah sedikit berbeda, laporan keuangan perusahaan terdiri atas lima jenis laporan keuangan, diantaranya Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.<sup>9</sup>

Menurut Mahmudi dalam Pramita, Laporan keuangan pemerintah daerah bisa menjadi suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya.<sup>10</sup> Laporan keuangan ini dapat menjadi pedoman pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga, diperlukan sebuah analisis laporan keuangan untuk mengambil langkah selanjutnya bagi pemerintah daerah tersebut.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2017*, artikel diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.54 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666>

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, h. Lampiran I.02 PSAP 01- 7

<sup>10</sup> Puput Risky Pramita, *Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 – 2013*, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, h. 3

Menurut Halim, Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan yang tertuang dalam APBD.<sup>11</sup>

Menurut Mardiosmo dalam Istyaningias menyatakan bahwa terdapat kegunaan dari Analisis rasio keuangan, diantaranya:

1. Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama satu periode tertentu.<sup>12</sup>

*“Menurut Pilat dan Morasa terdapat beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa cara untuk menganalisis kinerja keuangan daerah diantaranya menganalisis rasio kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung Share dan Growth, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”<sup>13</sup>*

Dengan adanya analisis dari laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah setempat dapat mempertahankan atau meningkatkan yang sudah diterimanya saat ini, dengan memperhatikan prinsip *value of money* yang terdiri atas ekonomi, efektivitas, dan efisien untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.

<sup>11</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. L-2

<sup>12</sup> Dian Istyaningias, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014*, Skripsi pada IAIN Surakarta, 2017, h. 6

<sup>13</sup> Juddy Julian Pilat dan Jenny Morasa, *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015*, Jurnal Accountability, Vo. 6, No. 1, Tahun 2017, Universitas Sam Ratulangi, h. 1-2



Jika dilihat dari laporan keuangan Kota Tangerang Selatan, lebih memprioritaskan untuk pembelanjaan operasi daripada pembelanjaan modal, padahal menurut Kementerian Dalam Negeri, menargetkan setiap pemda setidaknya meningkatkan belanja modal ini hingga 30%<sup>14</sup>, hal ini dikarenakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang Selatan Tahun dari tahun 2015 – April 2017 menunjukkan bahwa rata-rata belanja rutin atau belanja operasi sebesar 61%, dan rata-rata belanja pembangunan atau belanja modal sebesar 39% yang dapat dilihat pada Tabel 1.3<sup>15</sup>

**Tabel 1.3 Alokasi Belanja Kota Tangerang Selatan**

Tahun	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Persentase Belanja Operasi	Persentase Belanja Modal
Tahun 2015	Rp 2,621,240,244,577	Rp 1,637,712,529,895	Rp 982,985,799,542	62%	38%
Tahun 2016	Rp 3,304,722,367,399	Rp 1,997,421,129,431	Rp 1,292,809,790,968	60%	39%
Tahun 2017	Rp 3,443,686,072,737	Rp 2,020,868,684,651	Rp 1,421,076,388,086	59%	41%
Rata - Rata				61%	39%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019

Dalam hal ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan harus lebih memperbesar belanja modalnya untuk hal pertumbuhan dan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Debby, dkk, menyatakan bahwa di Kota Manado alokasi APBD tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>16</sup> Seharusnya, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mementingkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, agar daerah tersebut dapat berkembang dan dapat bersaing dengan daerah lainnya.

<sup>14</sup> Kementerian Keuangan, *30 Persen Alokasi APBD 2014 Diharapkan untuk Belanja Modal Daerah*, artikel diakses pada 06 Desember 2018 pukul 10.45 WIB dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/30-persen-alokasi-apbd-2014-diharapkan-untuk-belanja-modal-daerah/>

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2017*, artikel diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.54 WIB dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666>

<sup>16</sup> Debby Ch. Rotinsulu, dkk, *Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Sulawesi Utara*, Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi, 2015, h. 21

Jika dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.<sup>17</sup> Jika dilihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah Kota Tangerang Selatan, dari tahun 2015 – 2017, menunjukkan bahwa APBD Kota Tangerang Selatan mengalami deficit yang dapat dilihat pada Tabel 1.4<sup>18</sup>

**Tabel 1.4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang Selatan**

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Selisih
2015	Rp 2,602,412,225,495	Rp 2,621,240,244,577	-Rp 18,828,019,082
2016	Rp 2,580,459,404,371	Rp 3,304,722,367,399	-Rp 724,262,963,028
2017	Rp 14,291,939,315,863	Rp 14,733,699,981,655	-Rp 441,760,665,792

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dari Tabel 1.4 di atas, menunjukkan arti bahwa belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan cukup tinggi daripada pendapatannya. Karena pemerintah Kota Tangerang Selatan menggunakan system anggaran deficit, menurut Kunarjo menyatakan bahwa deficit suatu anggaran daerah akan memiliki dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi kecuali terjadinya inflasi yang tinggi, dapat menyebabkan suku bunga naik dan investasi menurun.<sup>19</sup>

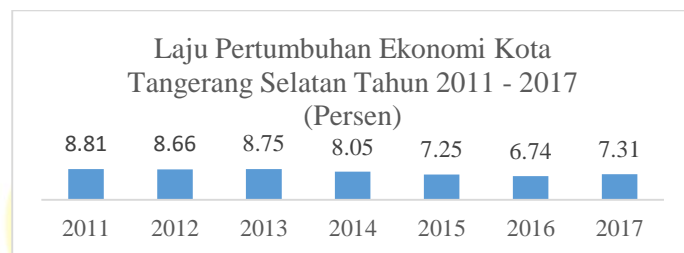
Berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan

<sup>17</sup> Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 7, h. 5

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2017*, artikel diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.54 WIB dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666>

<sup>19</sup> Kunarjo, *Defisit Anggaran Negara*, artikel di akses pada 20 Januari 2020 pukul 10.50 WIB, dari [https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/kunarjo2\\_20091015125127\\_2354\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/kunarjo2_20091015125127_2354_0.pdf)

berkisar antara 6% - 7,5% per tahun.<sup>20</sup> Ini adalah sebuah motivasi kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mencapai target tersebut di setiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan tahun 2011 – 2017 disajikan pada Gambar 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2017**

Tetapi kenyataannya, berdasarkan Gambar 1.1 yang diperoleh dari laporan akhir Pemkot Tangerang Selatan tahun 2018, menunjukkan kecenderungan tren menurun dari pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan periode 2013 – 2017. Jika dilihat dari grafik di atas, tahun 2013 – 2016 menunjukkan tren menurun disebabkan kurang menggairahkan karena laju pertumbuhan ekonominya menunjukkan tren yang melambat, sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan dapat meningkat yang disebabkan karena adanya peningkatan nilai produksi pada hampir semua lapangan usaha.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Dwirandra mengenai Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota mendapatkan hasil bahwa Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Rasio Efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh

<sup>20</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Data Investasi*, artikel diakses pada 06 Desember 2018 pukul 12.32 WIB dari [http://dpmptsp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data\\_investasi/12](http://dpmptsp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data_investasi/12)

<sup>21</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, *Data dan Statistik Bidang Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2018*, (Tangerang Selatan: Diskominfo dan BPS Kota Tangerang Selatan, 2018), h. 13

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya antara kinerja keuangan terhadap pengangguran, menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan Rasio Efektivitas PAD, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kawa mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah di kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan hasil bahwa Rasio kemandirian daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan rasio efisiensi anggaran sebagai alat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio keserasian belanja operasional dan modal sebagai alat pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sari mengenai Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara dengan hasil yaitu Kinerja keuangan dengan rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara. Kinerja keuangan dengan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara. Kinerja

---

<sup>22</sup> Ni Luh Nana Putri Ani dan A. A.N.B. Dwirandra, *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*, Jurnal E-Jurnal Akuntansi Udayana 6.3, 2014, h. 481

<sup>23</sup> Erlangga Pati Kawa, *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia)*, Skripsi pada Universitas Sebelas Maret, 2011, h. 76-77

keuangan dengan Rasio Efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara berpengaruh positif dan signifikan.<sup>24</sup>

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)**”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Belum mandirinya beberapa provinsi di Indonesia dalam hal pendapatannya.
2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan yang sifatnya mengalami kenaikan tidak signifikan.
3. Belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang masih memprioritaskan Belanja Operasi daripada Belanja Modal.

#### **C. Batasan Masalah**

Mengingat terdapat beberapa permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “Analisis kinerja keuangan daerah diantaranya menganalisis Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Apakah Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan?

---

<sup>24</sup> Greydi Normala Sari, dkk, *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*, Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi, h. 17

2. Apakah Rasio Efisiensi APBD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan?
3. Apakah Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi APBD berpengaruh secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bahwa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
2. Mengetahui bahwa Rasio Efisiensi APBD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Mengetahui bahwa Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi APBD berpengaruh secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018) ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah keilmuan mengenai kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, penelitian ini dapat menambah keilmuan di bidang pendidikan di tingkat SMA khususnya pada mata pelajaran Ekonomi pada pokok pembahasan APBN dan APBD serta perpajakan yang akan dipelajari di kelas XI.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada laporan ini adalah manfaat yang bisa secara langsung didapat oleh pihak terkait dalam penelitian ini adalah peneliti,

masyarakat Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengambil sebuah keputusan, dan kebijakan untuk memperbaiki dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.
- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja keuangan berupa rasio efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi APBD dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai penilaian kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD dan Rasio efisiensi APBD.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Deskripsi Teoritik

#### 1. Kinerja Keuangan Daerah

##### a. Pengertian Kinerja

Menurut Bernadin dan Rusel dalam Uno dan Lamatenggo menyatakan istilah kinerja dengan perfomansi adalah sejumlah catatan yang dihasilkan dari fungsi atau suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Suprihanto dalam Uno dan Lamatenggo menyatakan kinerja dengan istilah prestasi kerja, yaitu hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target, atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan telah disepakati bersama.<sup>1</sup>

Terkait konsep kinerja, Rummler dan Brache dalam Sudarmanto mengemukakan terdapat tiga level kinerja, yaitu:

- 1) Kinerja organisasi; pencapaian hasil (*out-come*) pada level atau unit analisis organisasi. Pada level ini, berkaitan dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
- 2) Kinerja proses, kinerja dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Pada level ini, dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
- 3) Kinerja individu, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Pada level ini, dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan mnajemen pekerjaan serta karakteristik individu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 62

<sup>2</sup> Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 7 – 8



Jadi kinerja merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam sebuah organisasi yang memiliki target, standar dan sifatnya dapat diperbandingkan dengan yang sebelumnya.

#### **b. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Agustina pada penelitiannya dalam Skripsi Pramita menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.<sup>3</sup>

Menurut Halim dalam Lubis kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.<sup>4</sup>

Kinerja keuangan daerah ini dapat dilihat hasilnya dengan menggunakan teknik analisis laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahmudi yang menyatakan bahwa laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa diberikan Gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan dan hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, atau politik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Puput Risky Pramita, *Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 – 2013*, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, h. 9

<sup>4</sup> Putri Kemala Dewi Lubis dan Nurlia Hafni, *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013*, Jurnal Kitabah, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, Universitas Negeri Medan, h. 23

<sup>5</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) h. 89

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan daerah yaitu pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik dari pendapatannya maupun belanjanya yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi dan target anggaran di tahun berjalan.

**c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mardiasmo dalam Pramita, menyatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan public.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.<sup>6</sup>

**d. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Lubis dan Hafni, Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi sebuah organisasi atau institusi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- 2) Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- 4) Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada
- 5) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

---

<sup>6</sup> Puput Risky Pramita, *Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 – 2013*, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, h. 10

- 6) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.<sup>7</sup>

**e. Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mahsun, pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya:
  - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
  - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
  - c) Jumlah infra struktur yang ada
  - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (*Process*), misalnya:
  - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
  - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya:
  - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
  - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya:
  - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
  - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya :
  - a) Tingkat kepuasan masyarakat
  - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator Dampak (*Impact*), misalnya:
  - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>7</sup> Putri Kemala Dewi Lubis dan Nurlia Hafni, *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013*, Jurnal Kitabah, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017 Universitas Negeri Medan, h. 25

b) Peningkatan pendapatan masyarakat<sup>8</sup>

#### f. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Halim, salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam APBD.<sup>9</sup> APBD sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Keuangan Negara yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>10</sup>

##### 1) Pengertian Analisis Rasio

Analisis rasio keuangan perlu dilakukan di setiap organisasi, begitu pun organisasi Pemerintahan. Analisis rasio keuangan ini membandingkan beberapa aspek yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sofyan Syafri Harahap dalam Cahyadi menyatakan bahwa “Analisis rasio keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.”<sup>11</sup>

Menurut Helfert dalam Mahsun, Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Halim, Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu

<sup>8</sup> Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 196

<sup>9</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. L-2

<sup>10</sup> Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1, h. 3

<sup>11</sup> Mhd Ichwan Cahyadi, *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, h. 27

<sup>12</sup> Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 135

periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.<sup>13</sup>

## 2) Rasio Kemandirian

Menurut Halim, Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.<sup>14</sup> Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Penghitungan rasio kemandirian sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi rasio kemandirian, menunjukkan bahwa semakin mandiri daerah tersebut terhadap bantuan dari pihak ekstern, begitu pun

<sup>13</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. L-4

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. L-5

sebaliknya. Hasil dari rasio kemandirian menurut Halim dalam Ramadhani dibedakan seperti terlihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25 – 50%	Konsultatif
Sedang	50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	75 – 100%	Delegatif

- a) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.<sup>15</sup>

### 3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Manopo, desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberi pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis yang dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang<sup>16</sup>, baik pelimpahan

<sup>15</sup> Febby Randria Ramadhani, *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2015*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14, No. 01, Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 89 – 90

<sup>16</sup> Novlie Manopo, dkk, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi, h. 4

wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu untuk melakukan hal-hal seperti kewenangan memungut pajak, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, dll.

Menurut Dilliger dalam Supriyadi, desentralisasi dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- a) Desentralisasi Politik, pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan public.
- b) Desentralisasi Administratif, pelimpahan wewenang yang bertujuan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab, dan sumber-sumber keuangan untuk penyediaan pelayanan public.
- c) Desentralisasi Fiskal, pelimpahan kewenangan yang mencakup *self financing* atau *cost recovery* dalam pemberian pelayanan public, *confinancing* atau *coproduction* dari pengguna jasa public, peningkatan *taxing power* transfer, dan bagi hasil, serta kewenangan dalam kebebasan melakukan pinjaman.
- d) Desentralisasi Ekonomi, kewenangan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi yang bertitik berat pada efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang public melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, yang sejalan dengan ekonomi pasar.<sup>17</sup>

Menurut Mahmudi, menyatakan bahwa Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam

---

<sup>17</sup> Supriyadi, dkk, *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 1, Tahun 2013, Universitas Jambi, h. 1

penyelenggaraan desentralisasi.<sup>18</sup> Penghitungan rasio derajat desentralisasi, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari hasil penghitungan di atas, menurut Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Bisma dan Susanto menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah terbagi menjadi enam tingkatan yang dapat dilihat pada Tabel 2.2<sup>19</sup>

**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah**

Persentase	Tingkatan Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

#### 4) Rasio Efektivitas PAD PAD

Menurut Mahmudi, Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi PAD dengan target penerimaan PAD, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dari Rasio Efektivitas PAD menurut Mahmudi yang terlihat pada Tabel 2.3<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) h. 140

<sup>19</sup> I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*, Jurnal GaneÇ Swara, Vol. 4, No. 3, Tahun 2010, Universitas Mahasaraswati Mataram, h. 78

<sup>20</sup> Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 141



**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90 – 99%	Cukup efektif
75% – 89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

### 5) Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Halim, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.<sup>21</sup> Rumus rasio efisien sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi menurut Mahmudi terlihat pada Tabel 2.4<sup>22</sup>

**Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah**

<10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup efisien
31% - 40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

<sup>21</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. L-6-7

<sup>22</sup> Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 142

### 6) Rasio Pertumbuhan PAD

Menurut Mahmudi, Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Halim menyatakan bahwa, Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rumus untuk menghitung pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:  $P_n$  = Pertumbuhan PAD tahun n

$P_o$  = Pertumbuhan PAD tahun sebelumnya

### 7) Rasio Keserasian Belanja

Menurut Halim, Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.<sup>24</sup> Ada 2

<sup>23</sup> Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 137

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. L-8

perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Menurut Mahmudi, Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah.<sup>25</sup> Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.<sup>26</sup> Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

<sup>25</sup> Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 162

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 162

Penentuan besarnya belanja operasi dan belanja modal di APBD ini tidak ada patokan yang baku, karena belanja ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Jika pemerintah daerah berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, maka pemerintah daerah seharusnya memperbesar anggaran di belanja modalnya daripada modal operasi.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

### a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Budiono dalam Chalid menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses, bukan sebagai suatu Gambaran ekonomi pada suatu saat (*one shoot*).<sup>27</sup>

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.<sup>28</sup>

Menurut Prof. Simon Kuznets dalam Jhingan mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Sehingga terdapat tiga komponen penting menurutnya, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus menerus, kedua teknologi yang maju menjadi faktor dalam pertumbuhan

---

<sup>27</sup> Pheni Chalid, *Teori Pertumbuhan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), h. 1.3 artikel diakses pada 08 Desember 2018 pukul 21.25 WIB dari <http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf>

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Cet. 23*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 423

ekonomi, dan ketiga adanya inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

Jadi, pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan *output* yang dihasilkan masyarakat disuatu daerah yang diukur melalui persentase penambahan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kurniawan dan Budhi, terdapat tiga hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, yaitu:

- 1) Efisiensi produksi,
- 2) Efisiensi alokasi, dan
- 3) Meningkatkan *input*.<sup>30</sup>

#### **b. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi proses meningkatnya sebuah *output* yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu daerah. Menurut Sukirno, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- 1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya
- 2) Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja
- 3) Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi
- 4) Sikap Sosial dan Sikap Masyarakat

Menurut Jhingan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dibedakan menjadi dua, yaitu;

- 1) Faktor Ekonomi, menganggap bahwa laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Faktor ekonomi ini terdiri atas:
  - a) Akumulasi Modal
  - b) Kemajuan Teknologi
  - c) Pembagian Kerja dan Skala Produksi
  - d) Sumber Daya Alam
  - e) Organisasi

<sup>29</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 57

<sup>30</sup> Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), h. 172

2) Faktor Non-Ekonomi, menurut Kaldor dalam Jhingan, pengkajian terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, di luar analisa faktor ekonomi, membawa kita kepada pengkajian terhadap unsur-unsur penentu yang bersifat psikologis dan sosiologis. Faktor non-ekonomi ini terdiri atas:

- a) Faktor Sosial
- b) Faktor Manusia
- c) Faktor Politik dan Administratif.<sup>31</sup>

### c. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

#### 1) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai dari seluruh produksi dalam suatu wilayah yang dinyatakan dengan uang (Rupiah) dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Produk Domestik Regional Bruto merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.<sup>32</sup>

#### 2) Ketidakseimbangan Pendapatan

Analisis ketidakseimbangan pendapatan dimulai dengan pertanyaan tentang berapa persen dari total pendapatan yang diterima oleh 10% populasi yang terendah, 50% terendah, atau 90% terendah, dan seterusnya. Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80% populasi terbawah akan menerima 80% dari total pendapatan, sedangkan 20% populasi teratas akan menerima 20% total pendapatan.

Ketidakseimbangan pendapatan yang tajam menimbulkan dampak negatif yang besar, karena bagian terbesar dari total

<sup>31</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 67 – 76

<sup>32</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.91

pendapatan dikuasai oleh sebagian kecil populasi, yang besar bertambah kuat dan yang kecil bertambah lemah. Kecenderungan ini akan menimbulkan kemiskinan structural yang makin bertambah berat.<sup>33</sup>

### 3) Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, di mana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peranan) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat.

Secara absolut nilai produksi sektor pertanian meningkat sebagai akibat dari penerapan sistem pertanian maju, penggunaan bibit unggul, pupuk, dan traktor serta sarana produksi pertanian lainnya, tetapi secara relatif, kontribusi nilai produksi pertanian terhadap nilai PDRB menurun karena, pertumbuhan nilai produksi sektor industri (yang menggunakan teknologi maju dan tepat guna) meningkat lebih tinggi, demikian pula sektor-sektor lainnya. Dalam masyarakat maju, sektor jasa (tersier) memperlihatkan pula pertumbuhan yang meningkat relatif tinggi.<sup>34</sup>

### 4) Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 240 juta jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah besar dan bertambah luas akibat krisis finansial global yang melanda Negara-negara di dunia, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat luas, konsumsi masyarakat menurun, tabungan menurun, investasi domestik menurun, yang mengakibatkan menurunnya kesempatan kerja.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 92

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 93

Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas serta barang-barang hasil industri.

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya. Peningkatan dan pengembangan berbagai kegiatan sektoral di berbagai daerah diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja, produksi nasional dan regional, pendapatan masyarakat, dan konsumsi masyarakat, dengan demikian dapat mengatasi pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan social.<sup>35</sup>

##### **5) Tingkat dan Penyebaran Kemudahan**

Menurut Hadjisarosa dalam Adisasmita, berpendapat bahwa kriteria yang dipilih untuk menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah adalah tingkat kemudahan, karena, tingkat pemakaian kriteria (indikator) pendapatan daerah (per kapita) sangat sukar untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain dari pada itu pendapatan belum memberikan Gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya masyarakat, pendapatan tinggi belum tentu tersedianya suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya.<sup>36</sup>

#### **d. Pengembangan Ekonomi Wilayah**

Pengembangan ekonomi wilayah pada hakikatnya adalah sebuah proses dimana pemerintah atau kelompok lainnya mengelola sumber daya yang telah dimilikinya untuk menciptakan pekerjaan baru dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 93

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 94



merangsang kegiatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Terdapat beberapa cara untuk melihat keberhasilan pembangunan wilayah ini, diantaranya:

- 1) Tingkat pendapatan rata-rata
- 2) Produk domestic Regional Bruto (PDRB)
- 3) Pertumbuhan ekonomi
- 4) Angka indeks pembangunan manusia, dll.<sup>37</sup>

**e. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

**1) Aliran Merkantilisme**

Pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara menurut kaum Merkantilis ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan.

**2) Aliran Klasik**

Tokoh-tokoh aliran Klasik antara lain Adam Smith dan David Ricardo.

**a) Adam Smith**

Adam Smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* tahun 1776. Menurut Adam Smith, ada empat faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- ✓ jumlah penduduk,
- ✓ jumlah stok barang-barang modal,
- ✓ luas tanah dan kekayaan alam, dan
- ✓ tingkat teknologi yang digunakan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Sulistiyanti dan Wahyudi, *pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Perikanan di Provinsi Jawa Timur*, (Jurnal (Media Trend, Vol. 10 No. 2, Oktober 2015, Universitas Trunojoyo), h. 141

<sup>38</sup> M.L. Jhingan, *Op.Cit.*, h. 81 – 83

b) David Ricardo

David Ricardo mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation*. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam.<sup>39</sup>

3) Aliran Neo Klasik

Tokoh-tokoh aliran Neo Klasik di antaranya Schumpeter, Harrod – Domar, dan Sollow – Swan.

a) Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian jika para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Adapun jenis-jenis inovasi, di antaranya dalam hal berikut.

- ✓ Penggunaan teknik produksi.
- ✓ Penemuan bahan dasar.
- ✓ Pembukaan daerah pemasaran.
- ✓ Penggunaan manajemen.
- ✓ Penggunaan teknik pemasaran.<sup>40</sup>

b) Harrod – Domar

Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut Teori Harrod – Domar, menjelaskan tentang syarat yang

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 88 – 89

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 125 - 126

harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harrod–Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal-hal berikut.

- ✓ Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment.
- ✓ Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor perusahaan (produsen).
- ✓ Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan.
- ✓ Hasrat menabung batas (Marginal Propensity to Save) besarnya tetap. Sehingga menurut Harrod – Domar pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh (full capacity) dalam jangka panjang.<sup>41</sup>

c) Sollow–Swan

Menurut teori Sollow–Swan, terdapat empat anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi.

- ✓ Tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu.
- ✓ Fungsi produksi  $Q = f(K,L)$  berlaku bagi setiap periode (K : Kapital, L : Labour).
- ✓ Adanya kecenderungan menabung dari masyarakat.
- ✓ Semua tabungan masyarakat diinvestasikan.

Pada tahun 1817, David Ricardo menerbitkan buku yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation*. Bukunya mempunyai pengaruh besar dalam pemikiran ekonomi, karena kecakapannya menganalisis masyarakat dengan istilah-istilah yang abstrak.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 229

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 274

#### 4) Aliran Historis

Terdapat beberapa tokoh yang menganut aliran historis dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu Friederich List, Bruno Hildebrand, Karl Bucher, dan Walt Whitman Rostow, sebagai berikut:

a) Friederich List (1789–18456)

Menurut Friederich List, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain: tahap primitive, beternak, pertanian, pertanian dan industri pengolahan, dan industri pengolahan dan perdagangan.<sup>43</sup>

Buku hasil karyanya berjudul *Das Nationale Sistem der Politischen Oekonomie* (1840).

b) Bruno Hildebrand (1812–1878)

Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran (tukar-menukar) yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonominya: masa pertukaran dengan natura (barter), masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit/giral. Pendapatnya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul *Die National Oekonomie der gegenwart und Zukunfit* (1848).<sup>44</sup>

c) Karl Bucher (1847–1930)

Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahap pertumbuhan ekonominya antara lain: produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian kota, dan perekonomian nasional.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Rowland B.F. Pasaribu, *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*, (Depok: Universitas Gunadarma, 2012), h. 29

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 29 – 30

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 30

## d) Walt Whitman Rostow

Dalam bukunya yang berjudul *The Stage of Economic Growth*, W.W. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Kelima tahap itu adalah masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi.<sup>46</sup>

**B. Penelitian yang Relevan**

Pada penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan seperti terlihat pada Tabel 2.5

**Tabel 2.5 Penelitian yang Relevan**

No.	Nama / Judul / Instansi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ni Luh Nana Putri Ani dan A. A.N.B. Dwirandra, <i>Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota</i> , (Bali: E-Jurnal Akuntansi Udayana 6.3, 2014)	Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya antara kinerja keuangan terhadap pengangguran, menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak	Menganalisis rasio keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Lokasi Penelitian, variabel dependen berupa Pengangguran, dan Kemiskinan, dan indikator kinerja keuangan daerah yang tidak terdapat rasio desentralisasi fiskal, dan keserasian belanja.

<sup>46</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 142

Tabel 2.5 (Lanjutan)

		berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan Rasio Efektivitas PAD, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. <sup>47</sup>		
2	Erlangga Pati Kawa, <i>Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia)</i> , Skripsi Fakultas Ekonomi UNS, 2011	Rasio kemandirian daerah, Rasio Efektivitas PAD PAD, dan rasio efisiensi anggaran sebagai alat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio keserasian belanja operasional dan modal sebagai alat pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. <sup>48</sup>	Menganalisis rasio keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Populasi penelitian, uji hipotesis, dan terdapat satu indikator kinerja keuangan daerah yang tidak ada, yaitu rasio desentralisasi fiskal.

<sup>47</sup> Ni Luh Nana Putri Ani dan A. A.N.B. Dwirandra, *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*, (Bali: E-Jurnal Akuntansi Udayana 6.3, 2014), h. 481

<sup>48</sup> Erlangga Pati Kawa, *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada*

Tabel 2.5 (Lanjutan)

3	Dian Istyaning-tias (2017), <i>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014</i> , Fakultas Ekonomi dan	Kabupaten Banyuwangi dan Kota Tegal memiliki rasio kemandirian paling tinggi, dan Kabupaten Blora dan Kota Pekalongan paling rendah. Rasio Efektivitas PAD, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati ber-ada pada posisi tertinggi dan Kabupaten Tegal dan Kota Surakarta berada pada posisi terendah. Rasio Efisiensi, Kabupaten Wonosobo dan Kota Magelang berada pada posisi tertinggi sedangkan Kabupaten Boyolali, dan Kota Pekalongan berada pada posisi terendah. Rasio aktivitas, kabupaten Pati dan Kabupaten Demak berada pada posisi tertinggi sedangkan kabupaten Banyumas dan Kota Tegal berada pada posisi terendah. Rasio pertumbuhan, kabupaten Banjarnegara dan Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi, sedangkan Kabupaten Semarang dan Kota Surakarta berada pada posisi terendah. <sup>49</sup>	Melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan teknik rasio keuangan daerah. Melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan teknik rasio keuangan daerah.	Lokasi penelitian, tahun penelitian, jumlah rasio yang digunakan untuk analisis kinerja keuangan, dan tidak adanya uji statistic dalam penelitian ini.
4	Diah Nurdi-waty, Badruz	Kinerja Keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam memenuhi	Melakukan analisis kinerja	Lokasi penelitian, tahun pe-

*Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia*), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2011, h. 76-77

<sup>49</sup> Dian Istyaningias, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017), h. xiii

Tabel 2.5 (Lanjutan)

	Zaman (2016), <i>Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri</i> , Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri	kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian sangat baik sekali. kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam merealisasikan pendapatan asli daerah tergolong efektif dan efisien. Kinerja keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan belum optimal dan sangat kecil sekali, hal ini dapat dilihat dari rasio aktivitas yang masih relatif kecil dari tahun ke tahun. kinerja Keuangan DPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tidak baik, hal ini dapat dilihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami penurunan dari periode ke periode. <sup>50</sup>	keuangan dengan menggunakan teknik rasio keuangan daerah.	nelitian, jumlah rasio yang digunakan untuk analisis kinerja keuangan, dan tidak adanya uji statistic dalam penelitian ini.
5	Greydi Normala Sari, dkk, <i>Pengaruh Kinerja Keuangan</i>	(1) Kinerja keuangan dengan rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggu-	Lokasi penelitian, tahun penelitian, jumlah rasio yang

<sup>50</sup> Diah Nurdiwaty dan Badruz Zaman (2016), *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri*, Jurnal Ekonomika-Bisnis, Vol. 7 No. 1, Januari 2016, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 39



Tabel 2.5 (Lanjutan)

	<p><i>terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014</i>, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi</p>	<p>perkotaan di Sulawesi Utara. (2) Kinerja keuangan dengan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara. (3) Kinerja keuangan dengan Rasio Efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara berpengaruh positif dan signifikan.<sup>51</sup></p>	<p>nakan teknik rasio keuangan daerah dan menggunakan uji statistic.</p>	<p>digunakan untuk analisis kinerja keuangan.</p>
--	--	---	--	---

### C. Kerangka Berpikir

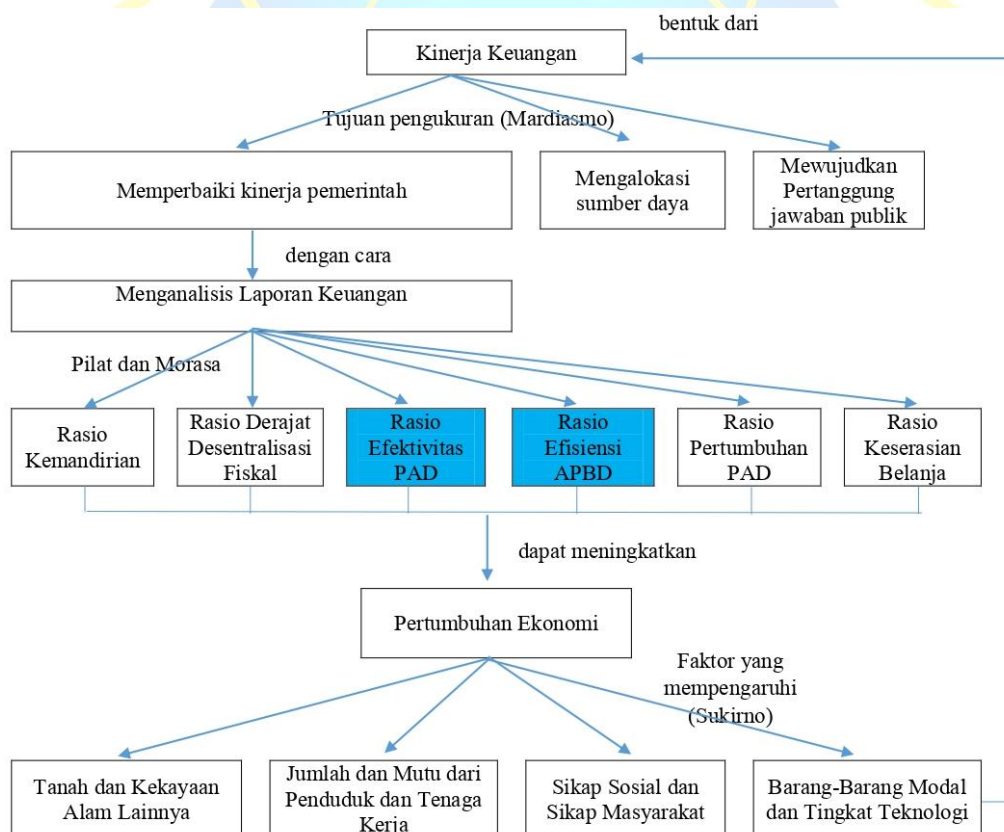
Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah kemudian direvisi menjadi UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini, memberikan hak kepada daerah untuk melakukan pengaturan, pemungutan pajak, dan belanja dari pendapatan yang diterima dari daerah tersebut. Selain pendapatan yang diterima dari daerah tersebut, pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Hak-hak tersebut dilakukan oleh masing-masing setiap daerah yang bisa disebut dengan kinerja keuangan daerah.

Dalam menjalankan kinerja keuangan daerah, terdapat beberapa tujuan salah satunya menurut Mardiasmo adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah salah satunya dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan daerah. Menurut

<sup>51</sup> Greydi Normala Sari, dkk, *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*, Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi), h. 17

Pilat dan Morasa, setidaknya terdapat enam rasio dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya: rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio keserasian belanja.

Rasio-rasio tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan di masing-masing daerah. Menurut Sukirno, terdapat empat factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah tersedianya barang-barang modal dan tingkat teknologi, dimana factor tersebut menjadi bagian dari kinerja keuangan pemerintah daerah untuk membelanjakan baik itu belanja operasional ataupun belanja modal. Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka berpikir di atas, maka dapat diilustrasikan seperti Gambar 2.1



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

#### D. Hipotesis

Menurut Margono dalam Radjab, menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (kurang dari) dan tesis (pendapat). Jadi hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>a1</sub> Terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan
- H<sub>01</sub> Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan
- H<sub>a2</sub> Terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan
- H<sub>02</sub> Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan
- H<sub>a3</sub> Terdapat pengaruh secara simultan antara kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan
- H<sub>03</sub> Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan

---

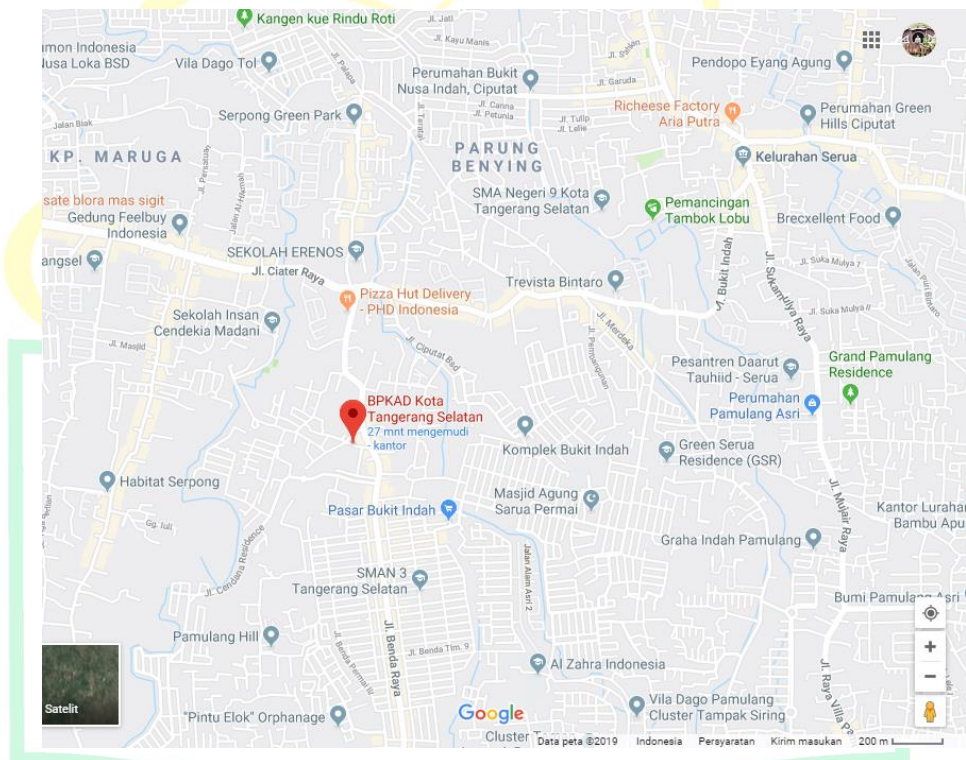
<sup>52</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h.54

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan yang berlokasi di Jalan Maruga Raya No. 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15414. Adapun seperti disajikan pada Gambar 3.1



**Gambar 3.1 Tempat Penelitian**

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yaitu dari bulan Maret 2019 hingga Agustus 2019. Pengambilan waktu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu tersebut penulis dapat membagi waktu untuk penelitian, penulisan skripsi, dan bimbingan. Waktu penelitian disajikan dalam Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	2019						2020
		3	4	5	6	7	8	1
1	Seminar Proposal							
2	Revisi Bab I – III (Pasca Seminar)							
3	Penetapan SK Pembimbing							
4	Penyusunan Bab I							
5	Penyusunan Bab II							
6	Penyusunan Bab III							
6	Penelitian Skripsi							
7	Penyusunan Bab IV							
8	Penyusunan Bab V							
9	Penyusunan Lampiran							
10	Pengeditan Skripsi							
11	Sidang Skripsi							

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Kasiram, dalam Kuntjojo mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Wijaya, pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan pendekatan yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk Tabel atau presentasi grafik, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), h, 11

<sup>2</sup> Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 37

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi Penelitian

Menurut Wijaya, Populasi merupakan sebagai seluruh kumpulan elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Populasi bisa disebut sebagai totalitas subjek penelitian.<sup>3</sup> Menurut Yusuf, populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (*area*) atau objek penelitiannya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, populasi penelitian yaitu Kota Tangerang Selatan.

### 2. Sampel Penelitian

Menurut Sax dalam Yusuf, menyatakan bahwa sampel merupakan suatu jumlah yang terbatas dari unsur yang terpilih dari suatu populasi. Unsur tersebut hendaklah mewakili populasi.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, sampel penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.

## D. Sumber Data

Menurut Nugraha data merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat berupa angka dan dapat pula berupa lambing atau sifat.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2011 – 2018 yang diambil secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, serta data pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan menurut harga konstan berdasarkan lapangan usaha dari tahun 2011 – 2018 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>4</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 145

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 150

<sup>6</sup> Jaka Nugraha, *Pengantar Analisis Data Kategorik Metode dan Aplikasi menggunakan Program R*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 5

## E. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel

### 1. Variabel Penelitian

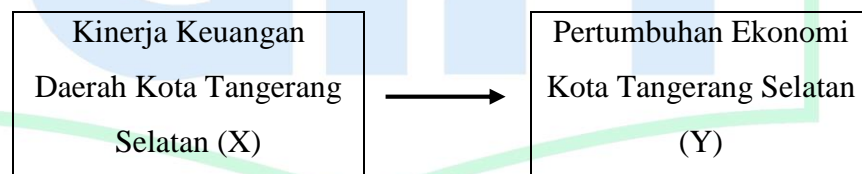
Menurut Kadir, variabel merupakan, konsep yang mempunyai nilai yang berubah-ubah atau mempunyai variasi nilai, keadaan, kategori, atau kondisi.<sup>7</sup> Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

#### a. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (variabel dependen).<sup>8</sup> Variabel bebas pada penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kota Tangerang Selatan dengan indicator rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi APBD yang akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Variabel ini diberikan simbol X.

#### b. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Variabel ini diberikan simbol Y yang disajikan pada Gambar 3.2



**Gambar 3.2 Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y**

<sup>7</sup> Kadir, *Statistika Terapan Konsep Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian Edisi 3*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 7

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 61

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 61

## 2. Definisi Variabel

### a. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan secara abstrak suatu fenomena atau variabel tertentu.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai definisi konseptual sebagai berikut:

#### 1) Kinerja Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kota Tangerang Selatan. Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai bentuk analisis kinerja keuangan daerah seperti analisis rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dll.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan daerah ini adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yaitu pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik dari pendapatannya maupun belanjanya yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi dan target anggaran di tahun

---

<sup>10</sup> Kadir, *Op.Cit.*, h. 7



berjalan. Dari definisi konseptual ini diperoleh dimensi: penghitungan rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi APBD.

## 2) **Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan**

Variabel terikat atau variabel dependen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan *output* yang dihasilkan masyarakat di suatu daerah yang diukur melalui persentase penambahan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu tertentu. Dari definisi konseptual ini diperoleh dimensi: besaran pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan.

### b. **Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan secara jelas, rinci, dan spesifik dari suatu variabel sehingga variabel tersebut dapat diukur. Definisi operasional berkaitan dengan skor yang mencerminkan dimensi atau indikator dari variabel yang diukur.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, definisi operasional sebagai berikut:

#### 1) **Kinerja Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan**

Kinerja keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang akan digunakan. Dalam penelitian ini terdapat dua rasio yang akan digunakan yaitu rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD. Rasio ini diukur melalui angka-angka atau nominal yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

---

<sup>11</sup> Kadir, *Op.Cit.*, h. 8

## 2) Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan antara produk domestik bruto (PDB) tahun ini dan produk domestik bruto (PDB) tahun sebelumnya yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dokumentasi.

Dokumentasi merupakan satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dll yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor BPKAD Kota Tangerang Selatan. Data yang diperoleh dibagi menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus.

Data umum berupa: Gambaran umum BPKAD Kota Tangerang Selatan. Sedangkan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang didapat dari BPKAD Kota Tangerang Selatan, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan tahun 2011 -2018 yang didapat dari BPS Kota Tangerang Selatan.

---

<sup>12</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 49-50

## G. Instrumen Penelitian

Menurut Widoyoko, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang diperlukan yaitu pedoman dokumentasi yang terdapat dua jenis, yaitu:

### 1. Laporan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini, laporan keuangan daerah yang diperlukan yaitu laporan realisasi anggaran Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018, dan laporan perencanaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018.

### 2. Laporan Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian ini, laporan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan menurut harga konstan berdasarkan lapangan usaha dari tahun 2011 – 2018.

## H. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data (coding), serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing obyek untuk setiap variabel yang diteliti.<sup>15</sup> Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>15</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 116

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 127

## 2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

### a. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi, Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi PAD dengan target penerimaan PAD, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dari Rasio Efektivitas PAD menurut Mahmudi yang terlihat pada Tabel 3.2<sup>17</sup>

**Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90 – 99%	Cukup efektif
75% – 89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

### b. Rasio Efisiensi APBD

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus rasio efisien sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi menurut Mahmudi terlihat pada Tabel 3.3<sup>18</sup>

**Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah**

<10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup efisien
31% - 40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

<sup>17</sup> Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 141

<sup>18</sup> Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 142

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki *mean* dan *standar deviasi* yang sama dengan kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametrik-test* (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal).<sup>19</sup>

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang memiliki kesimpulan berupa:

- Jika signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal
- Jika signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.<sup>20</sup>

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji asumsi tentang multikolinieritas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) lainnya. Frisch dalam Sudarmanto menyatakan bahwa istilah multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang “sempurna” atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.<sup>21</sup>

Model regresi yang baik, jika tidak terjadi gejala multikolinieritas. Dasar untuk menerima atau menolak uji multikolinieritas jika menggunakan pendekatan *Variance Inflation Factor* (VIF), dinyatakan sebagai berikut:

<sup>19</sup> Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 53

<sup>20</sup> Duwi Priyatno, *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS Cet. 1*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016) h. 105

<sup>21</sup> R. Gunawan Sudarmanto, *Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistiks 19*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 224

- Jika VIF hitung  $\leq 10$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak terdapat hubungan antarvariabel independen (tidak terjadi gejala multikolinieritas).
- Jika VIF hitung  $> 10$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat hubungan antarvariabel independen (terjadi gejala multikolinieritas).<sup>22</sup>

### c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan model Glejser yaitu:

- Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual  $< 0,05$  maka terjadi masalah heteroskedastisitas.<sup>23</sup>

### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam dataderetan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross sectional*). Konsekuensi dari adanya autokorelasi khususnya dalam model regresi adalah model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel kriterium (variabel dependen) pada nilai variabel predictor (variabel independen). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin –Watson. Kriteria menurut Durbin – Watson menurut Purnomo ditampilkan pada Tabel 3.4<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 239

<sup>23</sup> Duwi Priyatno, *Op.Cit.*, h. 131 dan 136

<sup>24</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), h. 123

**Tabel 3.4 Kriteria Pengujian Autokorelasi**

Durbin – Watson	Simpulan
$D_U < DW < 4 - D_U$	Tidak ada autokorelasi
$DW < D_L$ atau $DW > 4 - D_L$	Ada autokorelasi
$D_L < DW < D_U$ atau $4 - D_U < DW < 4 - D_L$	Tanpa simpulan

#### 4. Uji Regresi

Analisis Regresi Linier merupakan analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan persamaan linier. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Santosa dalam Takdir menyatakan bahwa analisis regresi dan korelasi berganda merupakan analisis terhadap suatu fenomena yang menunjukkan hubungan sebab akibat, dimana suatu variabel terikat ditentukan oleh lebih dari satu variabel bebas. Persamaan umum dalam analisis regresi linier berganda dinotasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi       $X_1$  = Rasio Efektivitas PAD  
 $\alpha$  = Konstanta                       $X_2$  = Rasio Efisiensi APBD.<sup>25</sup>  
 $\beta_{12}$  = Koefisien Regresi

#### 5. Uji Hipotesis

Menurut Lolombulan, hipotesis statistik adalah hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan matematis yang diturunkan berdasarkan hipotesis penelitian. Ada dua jenis hipotesis statistic, yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan ( $H_1$  atau  $H_a$ ). kedua hipotesis ini harus ditulis bersamaan tidak hanya  $H_1$  atau  $H_a$ .<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Soltan Takdir, *Statistik Sosial Teori & Aplikasi*, (Yogyakarta: Kutlah, 2015), h. 152

<sup>26</sup> Julius H. Lolombulan, *Statistika bagi Peneliti Pendidikan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h.

### a. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Menurut Suliyanto dalam Sari, nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t Tabel.<sup>27</sup> Untuk mengambil keputusan dalam uji koefisien regresi secara parsial (Uji t dan Uji Signifikansi) dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ Tabel}$  dan  $\text{signifikansi} < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.
- Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ Tabel}$  dan  $\text{signifikansi} > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.<sup>28</sup>

### b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F atau ANOVA merupakan analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara tiga atau lebih kelompok sampel yang independen.<sup>29</sup> Untuk mengambil keputusan dalam uji koefisien regresi secara bersama (ANOVA/Uji F dan Uji Signifikansi) dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ Tabel}$  dan  $\text{signifikansi} < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.
- Jika  $F \text{ hitung} < F \text{ Tabel}$  dan  $\text{signifikansi} > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Greydi Normala Sari, *Op.Cit.*, h. 10

<sup>28</sup> Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistik 25)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 207

<sup>29</sup> Duwi Priyatno, *Op.Cit.*, h. 88

<sup>30</sup> Ce Gunawan, *Op.Cit.*, h. 208



**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Sari, Nilai  $R^2$  disebut juga koefisien determinasi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Greydi Normala Sari, *Op.Cit.*, h. 11

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini terbagi atas lima bagian, yaitu data umum, data khusus, analisis data, statistik deskriptif data penelitian, dan pengujian prasyarat analisis dan pengajuan hipotesis sebagai berikut:

##### **1. Data Umum**

Data umum dari penelitian ini berisikan mengenai gambaran umum Kota Tangerang Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.

##### **a. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan**

Gambaran umum Kota Tangerang Selatan menjelaskan mengenai sejarah, visi dan misi, kondisi geografis, dan demografi dari Kota Tangerang Selatan.

##### **1) Sejarah Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia, Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada 28 Oktober 2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Lambang pemerintahan dari Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.1



**Gambar 4.1 Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan**

Rencana pemekaran Kota Tangerang Selatan ini berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke

dalam karasidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu suku sunda, suku betawi, dan suku tionghoa.

Wacana pembentukan kota otonom Tangerang Selatan (dahulu Cipasera) muncul sejak tahun 1999, namun belum adanya kata sepakat antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Tangerang tentang jumlah kecamatan yang akan bergabung dalam kota otonom ini, yang menjadi penghambat proses pembentukannya.

Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November 2000, dibentuk komite persiapan pembentukan daerah otonom (KPPDO) Kota Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada tahun 2002 pun melakukan kajian awal untuk mendaras kelayakan wilayah Kota Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kotamadya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 2.239,850 km<sup>2</sup>, kini telah menjadi daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun 2000 jumlah penduduk yang tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194 jiwa (Pagedangan diikutkan) atau setara dengan 34,5% penduduk Kabupaten Tangerang. Sayangnya wilayah yang telah berkembang menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan kota yang baik.

Pertimbangan lainnya adalah aspek pelayanan masyarakat, saat ini dengan letak pusat pemerintahan kabupaten di Tigaraksa jarak ini mencapai 50 km dari Kota Tangerang Selatan, sehingga sangat tidak efektif, dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang tinggi, Kota Tangerang Selatan membutuhkan konsentrasi pengelolaan yang lebih tinggi dibanding kecamatan di luar Tangerang Selatan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam kecamatan itu sangat besar, yaitu 309 miliar pertahunnya atau 60% dari PAD seluruh daerah Kabupaten Tangerang.

Berbagai kajian awal tentang peningkatan status wilayah Tangerang Selatan pendidikan dan teknologi juga telah dikaji, menjadi daerah otonom telah dilakukan, KPPDO Kota Cipasera (Tangerang Selatan) telah mengkajinya dari aspek hukum, social-ekonomi, social-budaya, social-politik, dan aspek pertahanan-keamanan.

Akhirnya pada tanggal 29 September 2008 keluar UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan melalui sidang paripurna DPR-RI, dengan cakupan wilayah Kecamatan Setu, Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, dan Pamulang bergabung dalam sebuah kota otonom bernama Kota Tangerang Selatan, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto akhirnya meresmikan Kota Tangerang Selatan sekaligus melantik Bapak Ir. H. M. Shaleh, MT. sebagai penjabat Walikota Tangerang Selatan.<sup>1</sup>

## 2) Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan

Visi dari Kota Tangerang Selatan yaitu: “Terwujudnya Tansel Kota Cerdas , Berkualitas dan Beradaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi.” Sedangkan Misi dari Kota Tangerang Selatan, yaitu:

- a) Mengembangkan Sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing.
- b) Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional.
- c) Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.
- d) Mengembangkan Ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.
- e) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.<sup>2</sup>

---

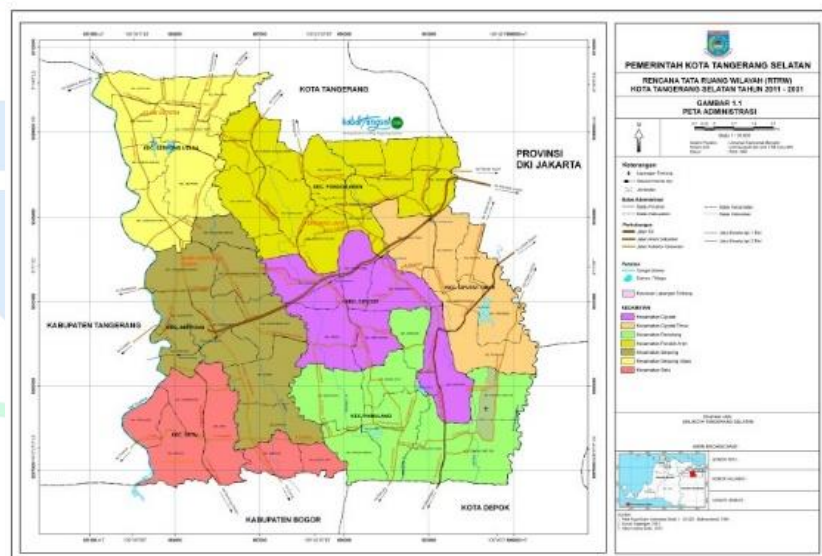
<sup>1</sup> Bapenda Kota Tangerang Selatan, *Profil Bapenda Kota Tangerang Selatan Tahun 2018*, (Tangerang Selatan: Bapenda Kota Tangerang Selatan, 2018), h. 3-4

<sup>2</sup> Pemerintah Kota Tangerang Selatan, *Visi dan Misi*, artikel diakses pada 11 Mei 2019 pada 13.45 WIB dari [https://berita.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/visi\\_misi/3](https://berita.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/visi_misi/3)

### 3) Kondisi Geografis

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu Kota yang terdapat di provinsi Banten. Secara astronomis, Kota Tangerang Selatan berada pada titik koordinat  $106^{\circ}38'$ -  $106^{\circ}47'$  Bujur Timur dan  $06^{\circ}13'30''$ -  $06^{\circ}22'30''$  Lintang Selatan.<sup>3</sup> Kota Tangerang Selatan ini resmi memisahkan diri dengan Kabupaten Tangerang berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan.

Saat ini, secara administratif Kota Tangerang Selatan memiliki tujuh Kecamatan dan lima puluh empat Kelurahan dan memiliki luas wilayah  $147,19 \text{ km}^2$  atau  $14,719 \text{ ha}$  dengan jumlah penduduk sebanyak 1.644.899 jiwa pada tahun 2017. Secara geografis, Kota Tangerang Selatan berbatasan langsung dengan Kota atau Kabupaten yang dapat dilihat pada Gambar 4.2



**Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan**

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang

<sup>3</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Data Investasi*, artikel diakses pada 06 Desember 2018 pukul 12.32 WIB dari [http://dpmpstp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data\\_investasi/12](http://dpmpstp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data_investasi/12)

- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Bogor dan Kota Depok
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.<sup>4</sup>

#### 4) Demografi

Demografi di Kota Tangerang Selatan cukup tinggi, berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 sebanyak 1.644.899 jiwa dengan 828.392 berjenis kelamin laki-laki, dan 816.507 berjenis kelamin perempuan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu di Kecamatan Pondok Aren sebanyak 392.284 jiwa, dan jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Setu sebanyak 86.783. Tabel penduduk Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.1<sup>5</sup>

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017**

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1 Setu	44.329	42.454	86.783
2 Serpong	91.552	93.209	184.761
3 Pamulang	176.996	173.927	350.923
4 Ciputat	121.483	117.669	239.152
5 Ciputat Timur	106.161	104.842	211.003
6 Pondok Aren	198.317	193.967	392.284
7 Serpong Utara	89.554	90.439	179.993
Jumlah	828.392	816.507	1.644.899

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2018

<sup>4</sup> Bapenda Kota Tangerang Selatan, *Op.Cit.*, h. 8

<sup>5</sup> Diskominfo dan BPS Kota Tangerang Selatan, *Data dan Statistik Bidang Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2018*, (Tangerang Selatan: Diskominfo dan BPS Kota Tangerang Selatan, 2018), h. 12

## **b. Gambaran Umum BPKAD Kota Tangerang Selatan**

Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan menjelaskan mengenai dasar hukum, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi dari BPKAD Kota Tangerang Selatan.

### **1) Dasar Hukum BPKAD Kota Tangerang Selatan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKAD memiliki dasar hukum, diantaranya:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara
- b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c) Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan
- d) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- f) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- h) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- i) Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, *Sekilas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*, (Tangerang Selatan: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2017), h. 2

## 2) Tugas dan Fungsi BPKAD

Tugas dari BPKAD yaitu melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan Fungsi dari BPKAD yaitu:

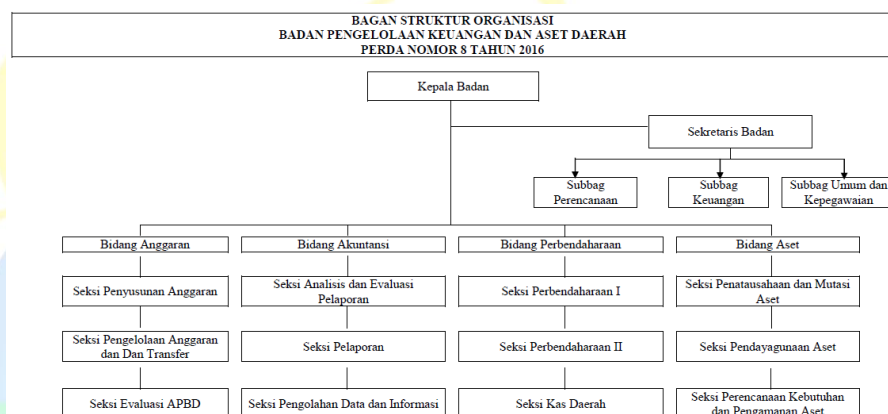
- a) Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang urusan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan.
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Aset.
- d) Pelaksanaan penerbitan Surat Pertanggungjawaban Surat Perintah Pencairan Dana.
- e) Pelaksanaan Penyusunan Perumusan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- f) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsi.
- h) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Aset.
- i) Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- j) Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



k) Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>7</sup>

### 3) Struktur Organisasi BPKAD Kota Tangerang Selatan

Struktur organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.3



**Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota  
Tangerang Selatan Tahun 2016<sup>8</sup>**

## 2. Data Khusus

Data khusus dalam penelitian berisikan Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang Selatan dan Laporan pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2011 hingga 2018. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertumbuhan Ekonomi dapat disajikan pada Tabel 4.2 – 4.10

### a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.2

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>8</sup> *Ibid*., h. 8

**Tabel 4.2 LRA Tahun Anggaran 2011**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 1.157.313.857.851</b>	<b>Rp 1.494.990.970.280</b>	<b>129,18%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 248.034.575.000	Rp 420.663.048.857	169,60%
3	Dana Perimbangan	Rp 618.465.579.834	Rp 634.793.925.678	102,64%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 290.813.703.017	Rp 439.533.995.745	151,14%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 1.257.777.227.485</b>	<b>Rp 1.289.438.935.283</b>	<b>102,52%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 896.642.411.869	Rp 866.923.478.598	96,69%
7	Belanja Modal	Rp 359.134.815.616	Rp 422.515.456.685	117,65%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 2.000.000.000	Rp -	0,00%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 100.463.369.634</b>	<b>Rp 205.552.034.997</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang lebih tinggi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2011 ini postur APBD Kota Tangerang Selatan surplus sebesar Rp 205.552.034.997.

#### **b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3 LRA Tahun Anggaran 2012**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 1.400.414.382.085</b>	<b>Rp 1.701.879.043.682</b>	<b>121,53%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 365.914.880.365	Rp 576.304.771.005	157,50%
3	Dana Perimbangan	Rp 689.694.470.480	Rp 710.045.050.158	102,95%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 344.805.031.240	Rp 415.529.222.519	120,51%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 1.553.567.040.016</b>	<b>Rp 1.743.189.975.881</b>	<b>112,21%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 1.018.320.060.828	Rp 1.050.310.088.751	103,14%
7	Belanja Modal	Rp 532.246.979.188	Rp 691.646.854.330	129,95%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 3.000.000.000	Rp 1.233.032.800	41,10%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 153.152.657.931</b>	<b>-Rp 41.310.932.199</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang lebih tinggi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2012 ini

postur APBD Kota Tangerang Selatan defisit sebesar Rp 41.310.932.199.

**c. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.4

**Tabel 4.4 LRA Tahun Anggaran 2013**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 1.830.892.148.444</b>	<b>Rp 2.019.535.444.396</b>	<b>110,30%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 600.851.230.000	Rp 728.965.301.483	121,32%
3	Dana Perimbangan	Rp 744.039.808.617	Rp 764.479.468.132	102,75%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 486.001.109.827	Rp 526.090.674.781	108,25%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 111.441.001.973</b>	<b>Rp 91.426.373.932</b>	<b>82,04%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 104.697.720.973	Rp 88.676.722.711	84,70%
7	Belanja Modal	Rp 3.243.281.000	Rp 2.561.847.321	78,99%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 3.500.000.000	Rp 187.803.900	5,37%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp 1.719.451.146.471</b>	<b>Rp 1.928.109.070.464</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2013 ini postur APBD Kota Tangerang Selatan surplus sebesar Rp 1.928.109.070.464.

**d. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5 LRA Tahun Anggaran 2014**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.152.078.860.702</b>	<b>Rp 6.337.396.698.105</b>	<b>294,48%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 866.955.379.209	Rp 1.023.817.429.319	118,09%
3	Dana Perimbangan	Rp 699.358.977.675	Rp 709.085.267.689	101,39%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 585.764.503.818	Rp 4.604.494.001.097	786,07%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 4.855.383.657.178</b>	<b>Rp 6.128.937.574.158</b>	<b>126,23%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 3.776.763.817.318	Rp 1.378.459.136.009	36,50%
7	Belanja Modal	Rp 1.076.332.607.295	Rp 4.750.206.918.181	441,33%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 2.287.232.566	Rp 271.519.968	11,87%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 2.703.304.796.476</b>	<b>Rp 208.459.123.947</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini serupa dengan realisasi belanja daerah yang lebih tinggi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2014 ini postur APBD Kota Tangerang Selatan surplus sebesar Rp 208.459.123.947.

**e. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6 LRA Tahun Anggaran 2015**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.555.588.265.237</b>	<b>Rp 2.602.098.780.288</b>	<b>101,82%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.120.064.009.792	Rp 1.228.080.444.405	109,64%
3	Dana Perimbangan	Rp 759.320.314.000	Rp 707.496.059.913	93,17%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 676.203.941.445	Rp 666.522.275.970	98,57%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.310.112.505.939</b>	<b>Rp 2.621.240.243.463</b>	<b>79,19%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 1.910.781.493.965	Rp 1.637.721.069.431	85,71%
7	Belanja Modal	Rp 1.387.159.930.289	Rp 982.977.258.892	70,86%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 12.171.081.685	Rp 541.915.140	4,45%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 754.524.240.702</b>	<b>-Rp 19.141.463.175</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2015 ini postur APBD Kota Tangerang Selatan defisit sebesar Rp 19.141.463.175.

**f. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.7

**Tabel 4.7 LRA Tahun Anggaran 2016**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.576.372.185.717</b>	<b>Rp 2.664.158.764.561</b>	<b>103,41%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.243.705.400.000	Rp 1.346.240.155.744	108,24%
3	Dana Perimbangan	Rp 874.186.891.950	Rp 847.221.054.205	96,92%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 458.479.893.767	Rp 470.697.554.612	102,66%

**Tabel 4.7 (Lanjutan)**

<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.312.068.407.336</b>	<b>Rp 2.888.885.248.322</b>	<b>87,22%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 2.047.101.058.820	Rp 1.839.405.627.276	89,85%
7	Belanja Modal	Rp 1.256.903.901.516	Rp 1.049.322.168.298	83,48%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 8.063.447.000	Rp 157.452.748	1,95%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 735.696.221.619</b>	<b>-Rp 224.726.483.761</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2016 ini postur APBD Kota Tangerang Selatan defisit sebesar Rp 224.726.483.761.

#### g. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.8

**Tabel 4.8 LRA Tahun Anggaran 2017**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.918.791.015.119</b>	<b>Rp 3.000.278.801.133</b>	<b>102,79%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.448.309.462.781	Rp 1.622.004.639.363	111,99%
3	Dana Perimbangan	Rp 907.352.242.023	Rp 867.028.622.374	95,56%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 563.129.310.315	Rp 511.245.539.396	90,79%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.430.581.892.581</b>	<b>Rp 2.967.633.308.554</b>	<b>86,51%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 2.139.470.451.627	Rp 1.960.015.418.296	91,61%
7	Belanja Modal	Rp 1.289.972.720.550	Rp 1.007.512.392.825	78,10%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 1.138.720.404	Rp 105.497.433	9,26%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 511.790.877.462</b>	<b>Rp 32.645.492.579</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2014 ini postur APBD Kota Tangerang Selatan surplus sebesar Rp 32.645.492.579.

#### h. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.9

**Tabel 4.9 LRA Tahun Anggaran 2018**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 3.120.025.909.741</b>	<b>Rp 3.211.105.498.451</b>	<b>102,92%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.494.034.264.514	Rp 1.621.710.653.274	108,55%
3	Dana Perimbangan	Rp 909.630.944.000	Rp 889.139.727.314	97,75%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 716.360.701.227	Rp 700.255.117.863	97,75%
5	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.642.462.279.782</b>	<b>Rp 3.271.441.999.424</b>	<b>89,81%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 2.414.359.485.497	Rp 2.251.191.724.053	93,24%
7	Belanja Modal	Rp 1.223.758.249.868	Rp 1.019.928.803.901	83,34%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 4.344.544.418	Rp 321.471.470	7,40%
9	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 522.436.370.041</b>	<b>-Rp 60.336.500.973</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa pendapatan Kota Tangerang Selatan mampu merealisasikan di atas dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2014 ini postur APBD Kota Tangerang Selatan defisit sebesar Rp 60.336.500.973.

#### **i. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan**

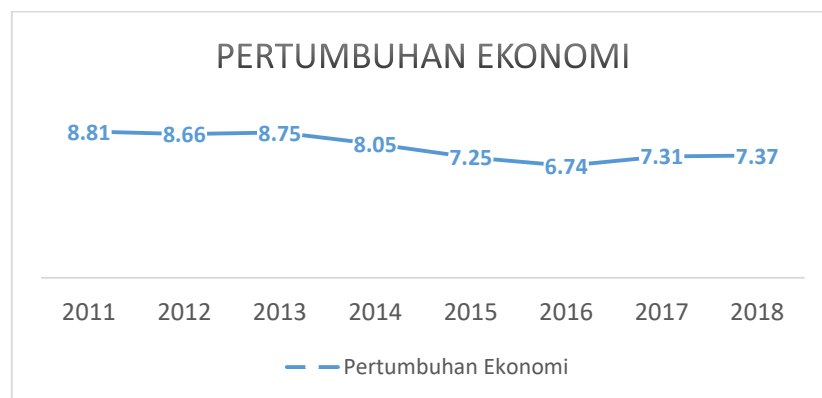
Laporan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Selatan periode 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.10

**Tabel 4.10 Pertumbuhan Ekonomi 2011 – 2018**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	8,81
2012	8,66
2013	8,75
2014	8,05
2015	7,25
2016	6,74
2017	7,31
2018	7,37
Rata-Rata	7,87

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2019

Dari Tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan berfluktuatif dan kecenderungan mengalami penurunan dari tahun 2011 ke 2012 dan 2013 sampai 2016 dan dapat dilihat grafik pertumbuhan ekonomi pada Gambar 4.4



**Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan**

### 3. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah DPKAD Kota Tangerang Selatan dalam penelitian ini merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan dari BPKAD Kota Tangerang Selatan selama delapan tahun sejak 2011 – 2018. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan daerah terdapat dua rasio, yaitu: rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan PAD. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut:

#### a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi PAD dengan target penerimaan PAD, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi rasio efektivitas, menunjukkan bahwa semakin efektif daerah tersebut dalam pencapaian hasil (*outcome*). Hasil penghitungan dari rasio kemandirian Kota Tangerang Selatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.11

**Tabel 4.11 Penghitungan Rasio Efektivitas**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2011	Rp 420.663.048.857	Rp 248.034.575.000	169.60%	Sangat Efektif
2012	Rp 576.304.771.005	Rp 365.914.880.365	157.50%	Sangat Efektif
2013	Rp 728.965.301.483	Rp 600.851.230.000	121.32%	Sangat Efektif
2014	Rp 1.023.817.429.319	Rp 866.955.579.209	118.09%	Sangat Efektif
2015	Rp 1.228.080.444.405	Rp 1.120.064.009.792	109.64%	Sangat Efektif
2016	Rp 1.346.240.155.744	Rp 1.243.705.400.000	108.24%	Sangat Efektif
2017	Rp 1.622.004.639.363	Rp 1.448.309.462.781	111.99%	Sangat Efektif
2018	Rp 1.621.710.653.274	Rp 1.494.034.264.514	108.55%	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>125,62%</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019 (diolah)

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 4.11, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas PAD Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018 sudah sangat efektif dengan rasio di atas 100%. Rasio efektivitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 169,60% sedangkan rasio efektivitas PAD terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 108,24% dengan rata-rata rasio efektivitas PAD Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018 sebesar 125,62%.

#### b. Rasio Efisiensi APBD

Rumus dari rasio efisien APBD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi rasio efisiensi, maka semakin tidak efisien suatu pemerintah daerah. Hasil penghitungan dari rasio efektivitas APBD Kota Tangerang Selatan, dapat dilihat pada Tabel 4.12

**Tabel 4.12 Penghitungan Rasio Efisiensi APBD**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2011	Rp 718,580,929,164	Rp 918,197,436,176	78.26%	Tidak Efisien
2012	Rp 1,289,438,935,283	Rp 1,494,990,970,280	86.25%	Tidak Efisien
2013	Rp 1,743,189,975,881	Rp 1,701,879,043,682	102.43%	Tidak Efisien
2014	Rp 91,426,373,932	Rp 2,019,535,444,396	4.53%	Sangat Efisien



**Tabel 4.12 (Lanjutan)**

2015	Rp 6,128,937,574,158	Rp 6,337,396,698,105	96.71%	Tidak Efisien
2016	Rp 2,621,240,243,464	Rp 2,602,098,780,288	100.74%	Tidak Efisien
2017	Rp 2,888,885,248,322	Rp 2,664,158,764,561	108.44%	Tidak Efisien
2018	Rp 2,967,633,308,554	Rp 3,000,278,801,133	98.91%	Tidak Efisien
<b>Rata-Rata</b>			<b>86,46%</b>	

Sumber: BPKAD Kota Tangerang Selatan, 2019 (diolah)

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 4.12, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi APBD Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018 tidak efisien dengan rasio di atas 70%. Rasio efisiensi APBD terbaik terjadi pada tahun 2014 sebesar 4,53% sedangkan rasio efisiensi APBD terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 108,44% dengan rata-rata rasio efisiensi APBD Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018 sebesar 86,46%.

#### 4. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu Rasio efektivitas PAD ( $X_1$ ) Rasio Efisiensi APBD ( $X_2$ ), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y). peneliti memperoleh data dengan datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan dan membuka website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan laporan keuangan dan datang langsung ke Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan dan membuka website BPS Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan data pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan. Adapun hasil statistik deskriptif data penelitian seperti pada Tabel 4.13

**Tabel 4.13 Hasil Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Efektivitas PAD	8	108.24	169.60	125.6162	24.08423
Rasio Efisiensi APBD	8	4.53	108.44	87.4863	34.10920
Pertumbuhan Ekonomi	8	6.74	8.81	7.8675	.80528
Valid N (listwise)	8				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Dalam analisis deksriptif yang tersaji dalam Tabel 4.13 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki *mean* sebesar 125.6162, Rasio efisiensi APBD sebesar 87.4863 dan untuk pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7.8675 yang nilainya cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 yang hanya mencapai 5.17%.

## 5. Pengujian Prasyarat Analisis dan Pengujian Hipotesis

### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).<sup>9</sup>

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat data yang telah terkumpul berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis megolah menggunakan SPSS dengan teknik *Kolomogorov-Smirnov*.

Kriteria pengukuran untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak melihat dari nilai siginifikasi (Asymp.sig). jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data residual berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data residual berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.14

<sup>9</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), h. 107

**Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.26869727
Most Extreme Differences	Absolute	.154
	Positive	.154
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		.435
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji normalitas menggunakan model *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,435 dan koefisien signifikan (Asymp. Sig) sebesar 0,991 yang artinya lebih besar dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel bebas (independen) dengan variabel bebas lainnya memiliki hubungan yang linier atau tidak. Penelitian yang baik, tidak adanya hubungan yang linier antar variabel bebasnya atau dengan kata lain, tidak terdapat gejala multikolinieritas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan hasil pada Tabel 4.15

**Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.722	.721		7.939	.001		
	Rasio Efektivitas PAD	.026	.005	.765	5.120	.004	.998	1.002
	Rasio Efisiensi APBD	-.012	.004	-.517	-3.458	.018	.998	1.002

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, di dapatkan hasil bahwa pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui nilai VIF untuk variabel rasio efektivitas PAD ( $X_1$ ) dan rasio efisiensi APBD ( $X_2$ ) masing-masing sebesar 1.002 dan 1.002 lebih kecil dari 10.00 maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi ini.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik jika tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, penulis megolah menggunakan SPSS dengan model Glejser.

Kriteria pengukuran untuk mengetahui data tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak melihat dari nilai signifikansi (*Asymp.sig*). jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.16

**Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.024	.430		.055	.958
	Rasio Efektivitas PAD	.000	.003	-.018	-.043	.967
	Rasio Efisiensi APBD	.002	.002	.406	.993	.366

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 4.16, diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Rasio Efektivitas PAD ( $X_1$ ) sebesar 0.967 dan Rasio Efisiensi APBD ( $X_2$ ) sebesar 0.366. Karena nilai signifikansi kedua variabel di atas lebih besar dari 0.05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam model ini bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada atau tidak korelasi antara data observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Penelitian ini memerlukan uji autokorelasi karena data yang digunakan berupa *time series* berupa laporan realisasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi selama delapan tahun terakhir dari tahun 2011 – 2018. Model yang digunakan dalam uji autokorelasi ini berupa model Durbin-Watson dengan hasil pada Tabel 4.17

**Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.943 <sup>a</sup>	.889	.844	.31793	1.996

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD, Rasio Efektivitas PAD

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1.996. selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai Tabel durbin Watson pada signifikansi 5% dengan

rumus  $(k ; N)$ . adapun jumlah variabel independen ( $k$ ) dalam penelitian ini adalah 2 dan jumlah sampel ( $N$ ) sebanyak 8, maka  $(k ; N) = (2 ; 8)$ . Berdasarkan nilai Tabel durbin Watson mendapatkan hasil  $d_L$  sebesar 0.5591 dan  $d_U$  sebesar 1.7771.

Nilai Durbin-Watson ( $d$ ) sebesar 1.996 terletak diantara  $d_U$  dan  $4 - d_U$ , maka berdasarkan kriteria pengujian autokorelasi Durbin-Watson menghasilkan kesimpulan tidak terdapat pengaruh autokorelasi.

### b. Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian dalam penelitian ini adalah menggunakan uji persamaan regresi. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan ingin mengetahui apakah tiga variabel independen ini berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap variabel dependen yang diteliti. Dalam pengujian regresi linier berganda menggunakan aplikasi computer SPSS20 dengan hasil pada Tabel 4.18

**Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.722	.721		7.939	.001
	Rasio Efektivitas PAD	.026	.005	.765	5.120	.004
	Rasio Efisiensi APBD	-.012	.004	-.517	-3.458	.018

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, menunjukkan hasil uji regresi berganda antara Rasio Efektivitas PAD ( $X_1$ ) dan Rasio Efisiensi APBD ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ) diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebesar -0.026 dan -0.012 Sedangkan nilai konstanta sebesar 5.722. Dengan demikian, persamaan regresi yang diperoleh adalah  $Y = 5.722 + 0.026X_1 - 0.012X_2$ . Dimana  $Y$  adalah pertumbuhan ekonomi,

sedangkan  $X_1$  Rasio Efektivitas PAD dan  $X_2$  Rasio Efisiensi APBD.

Dari persamaan berikut dapat dianalisis beberapa hal, diantaranya:

- a. Nilai konstanta sebesar 5.722 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel rasio efektivitas PAD ( $X_1$ ) dan rasio efisiensi APBD ( $X_2$ ), maka pertumbuhan ekonomi bernilai 5.722.
- b. Nilai koefisien rasio efektivitas PAD sebesar 0.026 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan rasio efektivitas PAD ( $X_1$ ) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi bertambah sebesar 0.026.
- c. Nilai koefisien rasio efisiensi APBD sebesar -0.012 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan rasio efisiensi APBD ( $X_2$ ) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi berkurang sebesar 0.012.

### c. Pengajuan Hipotesis

Penelitian ini mengajukan tiga hipotesis yang akan di uji dengan dua pengujian, yaitu:

#### 1) Uji T

Uji t pada dasarnya ingin mengetahui antara satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 0.05 dan diuji dengan 2 sisi. kriteria yang digunakan adalah apabila  $\text{Sig.} < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 diperoleh t tabel sebesar 2.570. kedua variabel independen setelah diuji menghasilkan uji sebagai berikut:

##### a) Rasio Kemandirian ( $X_1$ )

Hipotesis variabel rasio kemandirian

$H_{a1}$  Terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan

H<sub>01</sub> Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi rasio efektivitas PAD sebesar 0.004 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ( $0.004 < 0.05$ ) dan uji t hitung sebesar 5.120 lebih besar dari t Tabel sebesar 2.570 ( $5.120 > 2.570$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD (X<sub>1</sub>) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan (Y).

**b) Rasio Efisiensi APBD (X<sub>2</sub>)**

Hipotesis variabel rasio Pertumbuhan PAD

H<sub>a2</sub> Terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio Efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan

H<sub>02</sub> Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi rasio efisiensi APBD sebesar 0.018 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ( $0.018 < 0.05$ ) dan uji t hitung sebesar -3.458 lebih kecil dari -t Tabel sebesar -2.570 ( $-4.458 < -2.570$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi APBD (X<sub>2</sub>) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan (Y).

**2) Uji F**

Hipotesis penelitian

H<sub>a3</sub> Terdapat pengaruh secara simultan antara kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas



PAD, dan rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan

$H_{03}$  Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan f tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 diperoleh f tabel sebesar 5.14. hasil uji f dilihat pada Tabel 4.19

**Tabel 4.19 Hasil Uji F Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.034	2	2.017	19.955	.004 <sup>b</sup>
	Residual	.505	5	.101		
	Total	4.539	7			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD, Rasio Efektivitas PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Berdasarkan nilai signifikansi, pada Tabel 4.19 diperoleh nilai sebesar 0.004 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ( $0.004 < 0.05$ ) dan uji f hitung sebesar 19.955 lebih besar dari f tabel sebesar 5.14 ( $19.955 > 5.14$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas PAD ( $X_1$ ) dan rasio efisiensi APBD ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan (Y).

#### d. Uji Determinasi

Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau persentase variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.20

**Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 <sup>a</sup>	.889	.844	.31793

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD, Rasio Efektivitas PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas, diketahui nilai koefisien *Adjusted R Square* adalah 0.844 atau sama dengan 84.4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel rasio efektivitas PAD ( $X_1$ ) dan rasio efisiensi APBD ( $X_2$ ) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 84.4%. sedangkan sisanya ( $100\% - 84.4\% = 15.6\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

**Tabel 4.21 Tabel R Square  $X_1$** **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 <sup>a</sup>	.622	.559	.53452

a. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Dari tabel 4.21 diketahui bahwa nilai *R Square* adalah 0,622 atau sama dengan 62.2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa jika hanya variabel Rasio efektivitas PAD ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 62.2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain di luar model regresi ini.

**Tabel 4.22 Tabel R Square  $X_2$** **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 <sup>a</sup>	.305	.189	.72512

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2019

Dari tabel 4.22 diketahui bahwa nilai *R Square* adalah 0.305 atau sama dengan 30.5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa jika hanya variabel Rasio efisiensi APBD ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ) sebesar 30.5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain di luar model regresi ini.

## B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pada pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 – 2018. Pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji regresi linier berganda, menyatakan bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima yang artinya terdapat pengaruh secara positif antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut diketahui dengan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan  $t$  hitung  $>$   $t$  Tabel ( $5.120 > 2.570$ ). Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahmudi, yaitu semakin efektif suatu daerah, jika pemerintah daerah dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.<sup>10</sup>

Berpengaruhnya rasio efektivitas PAD ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan dilihat dari postur Pendapatan Asli Daerah yang mampu melebihi dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Nilai efektivitas PAD dari Kota Tangerang Selatan pun memiliki hasil yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 125,62% dan termasuk ke dalam kategori sangat efektif.

Karena Pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini melebihi dari target yang ditetapkan, maka Pemerintah Kota

---

<sup>10</sup> Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) h. 140

Tangerang Selatan dapat menggunakan pendapatannya tersebut untuk menggerakkan perekonomian di Kota Tangerang Selatan. Hal ini diperkuat pada penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin, dkk yang menyatakan tidak berpengaruhnya antara rasio efektivitas dengan pertumbuhan ekonomi di Solo Raya disebabkan karena realisasi pendapatan dengan target pendapatan di Solo Raya tidak terlalu signifikan atau kurang memenuhi konsep *value for money*.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan ketika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.<sup>12</sup>

## 2. Pengaruh Rasio Efisiensi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji regresi linier berganda, menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya berpengaruh secara negatif antara rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut diketahui dengan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan  $-t$  hitung  $< -t$  Tabel ( $-4.458 < -2,570$ ).

Berpengaruhnya secara negatif antara rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada postur anggaran APBD Kota Tangerang Selatan yang menggunakan anggaran yang defisit. Defisitnya anggaran Kota Tangerang Selatan yang terjadi selama empat tahun dalam rentang tahun 2011 – tahun 2018 dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, hal ini sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi

<sup>11</sup> Syamsudin, dkk, *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 17, No. 1, Juni 2015, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 23

<sup>12</sup> Greydi Normala Sari, dkk, *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*, Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi, h. 17

pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup> Maka, semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Berdasarkan teori Keynes, yang menyatakan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan penelitian ini, tetapi memiliki hubungan yang berkebalikan. Di Kota Tangerang Selatan, ketika semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan memacu pertumbuhan ekonomi tetapi semakin menurun tingkat pertumbuhannya.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kawa yang menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan Kota Tangerang Selatan membelanjai seluruh anggaran melebihi dari pendapatan yang diterimanya. Walaupun anggaran di Kota Tangerang Selatan tidak efisien dikarenakan tingginya belanja daripada pendapatan, belanja ini yang dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.

### **3. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan**

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji regresi linier berganda, menyatakan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{03}$  ditolak yang artinya berpengaruh secara simultan antara dua rasio kinerja keuangan yaitu rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut diketahui dengan pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan  $f$  hitung  $>$   $f$  Tabel ( $19.955 <$   $5.14$ ) dan nilai signifikansi  $<$   $0.05$  ( $0.004 <$   $0.05$ ).

Berpengaruhnya secara simultan antara rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh

---

<sup>13</sup> Azwar Iskandar, *Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, Vol. 20, No. 2, Agustus 2016), h. 155

<sup>14</sup> Erlangga Pati Kawa, *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia)*, Skripsi pada Universitas Sebelas Maret, 2011, h. 76-72

Mahmudi, yaitu semakin efektif suatu daerah, jika pemerintah daerah dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan dan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan yang menyatakan kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat.<sup>15</sup>

### C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan penelitian dan tidak sepenuhnya hasil penelitian ini mencapai tingkat kebenaran yang mutlak. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian lanjutan. Adapun keterbatasan yang dihadapi oleh penulis selama melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengambil satu kota sebagai lokasi penelitian, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sangat kecil dan data yang didapat dalam lingkup yang sedikit.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari BPKAD, website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS Kota Tangerang Selatan.
3. Terbatasnya analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, yaitu rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD.
4. Terbatasnya data yang diperoleh, dikarenakan Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang baru diresmikan pada tahun 2008.
5. Observasi di lapangan yang kurang sehingga terdapat kekurangan informasi yang diperoleh.

---

<sup>15</sup> Donny Kurniawan, *Pengaruh Kinerja keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Sumatera Brat dalam Era Otonomi Daerah*, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, 2010), h. 2

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan di paparkan pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan beberapa hal diantaranya, yaitu:

1. Rasio Efektivitas PAD berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.
2. Rasio Efisiensi APBD berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.
3. Kinerja keuangan daerah berupa Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi APBD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh implikasi sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Kota Tangerang Selatan sudah sangat efektif, hal ini terlihat dari realisasi PAD lebih tinggi dari target PAD dari tahun 2011 – 2018. Efektivitas Kota Tangerang Selatan ini membuat pemerintah Kota Tangerang Selatan mampu untuk menjaga dan meningkatkan strategi agar realisasi PAD tetap bisa melebihi target PAD yang ditetapkan, hal ini dilakukan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.
2. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa rasio efisiensi APBD Kota Tangerang Selatan tidak efisien, hal ini terlihat dari defisitnya anggaran Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun. Walaupun tidak efisiensi anggaran Kota Tangerang Selatan karena tingginya belanja daerah daripada pendapatan yang diterimanya, hal ini dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.
3. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur melalui dua rasio yaitu rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari nilai determinasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 84,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

### C. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

#### 1. **Bagi Pemerintah**

Dengan mengetahui kinerja keuangan daerah yang berpengaruh ataupun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini berfungsi sebagai masukan kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memperhatikan konsep *value of money* yang terdiri atas tiga hal yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Selain itu pemerintah Kota Tangerang Selatan harus memiliki pertimbangan agar postur anggaran tidak mengalami defisit di setiap tahunnya dan dapat mempertahankan pencapaian realisasi penerimaannya.

#### 2. **Bagi Pembaca**

Dengan mengetahui kinerja keuangan daerah yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini sebagai pengingat kepada para pembaca yang sudah memiliki NPWP untuk melakukan kewajibannya berupa membayar pajak, karena hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

#### 3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dengan mengetahui kinerja keuangan daerah yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini menjadi rujukan referensi untuk lebih baik dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, saran yang dapat disampaikan adalah lebih banyak rasio dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini agar data yang terkumpul lebih banyak dan hasil penelitian pun lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. 2017. *Sekilas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017*. Tangerang Selatan: BPKAD Kota Tangerang Selatan.
- Bapenda Kota Tangerang Selatan. 2018. *Profil Bapenda Kota Tangerang Selatan Tahun 2018*. Tangerang Selatan: Bapenda Kota Tangerang Selatan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. 2018. *Data dan Statistik Bidang Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2018*. Tangerang Selatan: Diskominfo dan BPS Kota Tangerang Selatan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. 2018. *Data dan Statistik Bidang Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2018*. Tangerang Selatan: Diskominfo dan BPS Kota Tangerang Selatan.
- Gunawan, Ce. 2018. *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistic 25)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kadir. 2017. *Statistika Terapan Konsep Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian Edisi 3*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri).
- Kurniawan, Paulus dan Made Kembar Sri Budhi. 2015. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Lolombulan, Julius H. 2017. *Statistika bagi Peneliti Pendidikan*. Yogyakarta: ANDI.

- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE).
- Nugraha, Jaka. 2017. *Pengantar Analisis Data Kategorik Metode dan Aplikasi menggunakan Program R*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pasaribu, Rowland B.F.. 2012. *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*. Depok: Universitas Gunadarma.
- Priyatno, Duwi. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS Cet. 1*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2016. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: Wade Group.
- Radjab, Enny dan Andi Jam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 19*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar Cet. 23*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Takdir, Soltan. 2015. *Statistik Sosial Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Kutlah.
- Uno, Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widoyoko, Eko Putro. 2017. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **JURNAL**

Ani, Ni Luh Nana Putri dan A. A.N.B. Dwirandra. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*. Jurnal E-Jurnal Akuntansi Udayana 6.3.

Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*, Jurnal GaneÇ Swara, Vol. 4, No. 3, Tahun 2010. Universitas Mahasaraswati Mataram.

Fathah, Rigel Nurul. 2017. *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal EBBANK, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017. STIE B Bank Yogyakarta.

Iskandar, Azwar. 2016. *Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, Vol. 20, No. 2, Agustus. Balai Diklat Keuangan Makassar.

Lubis, Putri Kemala Dewi dan Nurlia Hafni. 2017. *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013*. Jurnal Kitabah, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, Universitas Negeri Medan.

Manopo, Novlie, dkk. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi.

Nurdiwaty, Diah, dan Badruz Zaman. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri*. Jurnal Ekonomika Bisnis, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Pilat, Juddy Julian dan Jenny Morasa. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015*, Jurnal Accountability, Vo. 6, No. 1, Tahun 2017. Universitas Sam Ratulangi.
- Ramadhani, Febby Randria. 2016. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2015*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14, No. 01, Tahun 2016. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rotinsulu, Debby Ch, dkk. 2015. *Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Sulawesi Utara*. Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi.
- Sari, Greydi Normala, dkk. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*. Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi.
- Sulistiyanti dan Wahyudi. 2015. *Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Perikanan di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal (Media Trend, Vol. 10 No. 2, Oktober 2015. Universitas Trunojoyo.
- Supriyadi, dkk. 2013. *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 1, Tahun 2013. Universitas Jambi.
- Syamsudin, dkk. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 17, No. 1, Juni 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **SKRIPSI**

- Cahyadi, Mhd Ichwan. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Skripsi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Istyaningtias, Dian. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014*. Skripsi pada IAIN Surakarta.
- Kawa, Erlangga Pati. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-*

*Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia)*. Skripsi pada Universitas Sebelas Maret.

Kurniawan, Donny. 2010. *Pengaruh Kinerja keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Lusiana, Valentina Yesi. 2009. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Skripsi pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pramita, Puput Risky. 2015. *Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 – 2013*. Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta.

#### **PERATURAN PEMERINTAH/ UNDANG-UNDANG**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Kunarjo, *Defisit Anggaran Negara*, artikel di akses pada 20 Januari 2020 pukul 10.50 WIB, dari

[https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/kunarjo2\\_20091015125127\\_2354\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/kunarjo2_20091015125127_2354_0.pdf)

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **WEBSITE**

Chalid, Pheni. *Teori Pertumbuhan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka) artikel diakses pada 08 Desember 2018 pukul 21.25 WIB dari <http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Data Investasi*, artikel diakses pada 06 Desember 2018 pukul 12.32 WIB dari [http://dpmpstp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data\\_investasi/12](http://dpmpstp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data_investasi/12)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2017*, artikel diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.54 WIB dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666>

Kementerian Keuangan, *30 Persen Alokasi APBD 2014 Diharapkan untuk Belanja Modal Daerah*, artikel diakses pada 06 Desember 2018 pukul 10.45 WIB dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/30-persen-alokasi-apbd-2014-diharapkan-untuk-belanja-modal-daerah/>

Kementerian Keuangan, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018 Lebih Tinggi dari Tahun 2017*, artikel diakses pada 15 Juli 2019 pukul 21.54 pada <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2018-lebih-tinggi-dari-tahun-2017/>



















Kunarjo, *Defisit Anggaran Negara*, artikel di akses pada 20 Januari 2020 pukul 10.50 WIB, dari [https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/kunarjo2\\_20091015125127\\_2354\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/kunarjo2_20091015125127_2354_0.pdf)

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, *Visi dan Misi*, artikel diakses pada 11 Mei 2019 pada 13.45 WIB dari [https://berita.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/visi\\_misi/3](https://berita.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/visi_misi/3)





































**Lampiran 1 Uji Referensi****LEMBAR UJI REFERENSI**

Nama : Ridho Rachman  
 NIM : 11150150000079  
 Jurusan : Pendidikan IPS  
 Judul : Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap  
 Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota  
 Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018)

No.	Referensi	Pembimbing	
		I	II
1	Adisasmita, Rahardjo. 2014. <i>Pertumbuhan Wilayah &amp; Wilayah Pertumbuhan</i> . Yogyakarta: Graha Ilmu.		
2	Ani, Ni Luh Nana Putri dan A. A.N.B. Dwirandra. 2014. <i>Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota</i> . Jurnal E-Jurnal Akuntansi Udayana 6.3.		
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. 2017. <i>Sekilas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017</i> . Tangerang Selatan: BPKAD Kota Tangerang Selatan.		
4	Bapenda Kota Tangerang Selatan. 2018. <i>Profil Bapenda Kota Tangerang Selatan Tahun 2018</i> . Tangerang Selatan: Bapenda Kota Tangerang Selatan.		
5	Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. <i>Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007</i> , Jurnal GaneC Swara, Vol. 4, No. 3, Tahun 2010. Universitas Mahasaraswati Mataram.		
6	Cahyadi, Mhd Ichwan. 2012. <i>Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti</i> . Skripsi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau.		
7	Chalid, Pheni. <i>Teori Pertumbuhan</i> , (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka) artikel diakses pada 08 Desember 2018 pukul 21.25 WIB dari <a href="http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf">http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf</a>		
8	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. 2018. <i>Data dan Statistik Bidang Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2018</i> . Tangerang Selatan: Diskominfo dan BPS Kota Tangerang Selatan.		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, <i>Data Investasi</i> , artikel diakses pada 06 Desember 2018 pukul 12.32 WIB dari <a href="http://dpmpptsp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data_investasi/12">http://dpmpptsp.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/data_investasi/12</a>		
10	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2017</i> , artikel		



No.	Referensi	Pembimbing	
		I	II
	diakses pada 02 Desember 2018 pukul 09.54 WIB dari <a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666">http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666</a>		
11	Fathah, Rigel Nurul. 2017. <i>Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul</i> . Jurnal EBBANK, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017. STIE B Bank Yogyakarta.		
12	Gunawan, Ce. 2018. <i>Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistic 25)</i> . Yogyakarta: Deepublish.		
13	Gunawan, Imam. 2017. <i>Pengantar Statistika Inferensial</i> . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.		
14	Halim, Abdul. 2012. <i>Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4</i> . Jakarta: Salemba Empat.		
15	Istyaningtias, Dian. 2017. <i>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014</i> . Skripsi pada IAIN Surakarta.		
16	Jhingan, M.L. 2012. <i>Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan</i> . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.		
17	Kadir. 2017. <i>Statistika Terapan Konsep Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian Edisi 3</i> . Depok: PT RajaGrafindo Persada.		
18	Kawa, Erlangga Pati. 2011. <i>Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia)</i> . Skripsi pada Universitas Sebelas Maret.		
19	Kementerian Keuangan, <i>30 Persen Alokasi APBD 2014 Diharapkan untuk Belanja Modal Daerah</i> , artikel diakses pada 06 Desember 2018 pukul 10.45 WIB dari <a href="https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/30-persen-alokasi-apbd-2014-diharapkan-untuk-belanja-modal-daerah/">https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/30-persen-alokasi-apbd-2014-diharapkan-untuk-belanja-modal-daerah/</a>		
20	Kementerian Keuangan, <i>Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018 Lebih Tinggi dari Tahun 2017</i> , artikel diakses pada 15 Juli 2019 pukul 21.54 pada <a href="https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2018-lebih-tinggi-dari-tahun-2017/">https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2018-lebih-tinggi-dari-tahun-2017/</a>		
21	Kuntjojo. 2009. <i>Metodologi Penelitian</i> , (Kediri: Universitas Nisantara PGRI Kediri.		
22	Kurniawan, Paulus dan Made Kembar Sri Budhi. 2015. <i>Pengantar Ekonomi Mikro &amp; Makro</i> . Yogyakarta: Penerbit ANDI.		
23	Lolombulan, Julius H. 2017. <i>Statistika bagi Peneliti Pendidikan</i> . Yogyakarta: ANDI.		
24	Lubis, Putri Kemala Dewi dan Nurlia Hafni. 2017. <i>Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013</i> . Jurnal Kitabah, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, Universitas Negeri Medan.		
25	Lusiana, Valentina Yesi. 2009. <i>Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</i> . Skripsi pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.		
26	Mahmudi. 2016. <i>Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga</i> . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.		
27	Mahsun, Mohammad. 2012. <i>Pengukuran Kinerja Sektor Publik</i> , (Yogyakarta: BPFE.		

No.	Referensi	Pembimbing	
		I	II
28	Manopo, Novlie, dkk. <i>Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara</i> . Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi.		
29	Nugraha, Jaka. 2017. <i>Pengantar Analisis Data Kategorik Metode dan Aplikasi menggunakan Program R</i> . Yogyakarta: Deepublish.		
30	Nurdiwaty, Diah, dan Badruz Zaman. 2016. <i>Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri</i> . Jurnal <i>Ekonomika Bisnis</i> , Vol. 7 No. 1 Tahun 2016. Universitas Muhammadiyah Malang.		
31	Pasaribu, Rowland B.F.. 2012. <i>Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan</i> . Depok: Universitas Gunadarma.		
32	Pemerintah Kota Tangerang Selatan, <i>Visi dan Misi</i> , artikel diakses pada 11 Mei 2019 pada 13.45 WIB dari <a href="https://berita.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/visi_misi/3">https://berita.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/visi_misi/3</a>		
33	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan		
34	Pilat, Juddy Julian dan Jenny Morasa. 2017. <i>Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015</i> , Jurnal <i>Accountability</i> , Vo. 6, No. 1, Tahun 2017. Universitas Sam Ratulangi.		
35	Pramita, Puput Risky. 2015. <i>Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 – 2013</i> . Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta.		
36	Priyatno, Duwi. 2016. <i>Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS Cet. 1</i> . Yogyakarta: Gava Media.		
37	Purnomo, Rochmat Aldy. 2016. <i>Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS</i> . Ponorogo: Wade Group.		
38	Putri, Zuwesty Eka. 2015. <i>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah</i> . Jurnal <i>Bisni dan Manajemen Esensi</i> , Vol. 5, No.2, Oktober 2015. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.		
39	Radjab, Enny dan Andi Jam'an. 2017. <i>Metodologi Penelitian Bisnis</i> . Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.		
40	Ramadhani, Febby Randria. 2016. <i>Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2015</i> . Jurnal <i>Ekonomi Pembangunan</i> , Vol. 14, No. 01, Tahun 2016. Universitas Muhammadiyah Malang.		
41	Renyowijoyo, Muindro. 2013. <i>Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3</i> . Jakarta: Mitra Wacana Media.		
42	Rotinsulu, Debby Ch, dkk. 2015. <i>Analisis Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Sulawesi Utara</i> . Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi.		
43	Sari, Greydi Normala, dkk. <i>Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014</i> . Jurnal pada Universitas Sam Ratulangi.		
44	Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. <i>SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset</i> . Jakarta: Salemba Empat.		

No.	Referensi	Pembimbing	
		I	II
45	Sudarmanto, R. Gunawan. 2013. <i>Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 19</i> . Jakarta: Mitra Wacana Media.		
46	Sudarmanto. 2009. <i>Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.		
47	Sugiyono. 2015. <i>Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&amp;B</i> . Bandung: Alfabeta.		
48	Sukirno, Sadono. 2015. <i>Makroekonomi Teori Pengantar Cet. 23</i> . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.		
49	Supriyadi, dkk. 2013. <i>Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo</i> . Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 1, Tahun 2013. Universitas Jambi.		
50	Syamsudin, dkk. 2015. <i>Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan</i> . Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 17, No. 1, Juni 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta.		
51	Takdir, Soltan. 2015. <i>Statistik Sosial Teori &amp; Aplikasi</i> . Yogyakarta: Kutlah.		
52	Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara		
53	Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah		
54	Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah		
55	Uno, Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. 2012. <i>Teori Kinerja dan Pengukurannya</i> . Jakarta: PT Bumi Aksara.		
56	Widoyoko, Eko Putro. 2017. <i>Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.		
57	Wijaya, Tony. 2013. <i>Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik</i> . Yogyakarta: Graha Ilmu.		
58	Yusuf, Muri. 2014. <i>Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan</i> . Jakarta: Prenadamedia Group.		

Jakarta, 08 Agustus 2019

**Dosen Pembimbing I**

**Neng Sri Nuraeni, M.Pd**

NIDN.2005058801

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Sodikin, M.Si**

NIDN. 2022028704

## Lampiran 2 Data Dokumentasi

### 1. Laporan Realisasi Anggaran TA 2011

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 1.157.313.857.851</b>	<b>Rp 1.494.990.970.280</b>	<b>129,18%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 248.034.575.000	Rp 420.663.048.857	169,60%
3	Dana Perimbangan	Rp 618.465.579.834	Rp 634.793.925.678	102,64%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 290.813.703.017	Rp 439.533.995.745	151,14%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 1.257.777.227.485</b>	<b>Rp 1.289.438.935.283</b>	<b>102,52%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 896.642.411.869	Rp 866.923.478.598	96,69%
7	Belanja Modal	Rp 359.134.815.616	Rp 422.515.456.685	117,65%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 2.000.000.000	Rp -	0,00%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 100.463.369.634</b>	<b>Rp 205.552.034.997</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp 100.463.369.634</b>	<b>Rp 225.213.089.805</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp 100.463.369.634	Rp 225.745.621.805	
12	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	-Rp 532.532.000	

Tangerang Selatan, 31 Desember 2011  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

### 2. Laporan Realisasi Anggaran TA 2012

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 1.400.414.382.085</b>	<b>Rp 1.701.879.043.682</b>	<b>121,53%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 365.914.880.365	Rp 576.304.771.005	157,50%
3	Dana Perimbangan	Rp 689.694.470.480	Rp 710.045.050.158	102,95%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 344.805.031.240	Rp 415.529.222.519	120,51%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 1.553.567.040.016</b>	<b>Rp 1.743.189.975.881</b>	<b>112,21%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 1.018.320.060.828	Rp 1.050.310.088.751	103,14%
7	Belanja Modal	Rp 532.246.979.188	Rp 691.646.854.330	129,95%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 3.000.000.000	Rp 1.233.032.800	41,10%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 153.152.657.931</b>	<b>-Rp 41.310.932.199</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp 153.152.657.931</b>	<b>Rp 430.765.124.802</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp 153.152.657.931	Rp 430.765.124.802	
12	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	

Tangerang Selatan, 31 Desember 2012  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

### 3. Laporan Realisasi Anggaran TA 2013



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**  
**PERIODE: 01 JANUARI 2013 - 31 DESEMBER 2013**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 1.830.892.148.444</b>	<b>Rp 2.019.535.444.396</b>	<b>110,30%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 600.851.230.000	Rp 728.965.301.483	121,32%
3	Dana Perimbangan	Rp 744.039.808.617	Rp 764.479.468.132	102,75%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 486.001.109.827	Rp 526.090.674.781	108,25%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 111.441.001.973</b>	<b>Rp 91.426.373.932</b>	<b>82,04%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 104.697.720.973	Rp 88.676.722.711	84,70%
7	Belanja Modal	Rp 3.243.281.000	Rp 2.561.847.321	78,99%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 3.500.000.000	Rp 187.803.900	5,37%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp 1.719.451.146.471</b>	<b>Rp 1.928.109.070.464</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	-
12	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	-

Tangerang Selatan, 31 Desember 2013  
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

### 4. Laporan Realisasi Anggaran TA 2014



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**  
**PERIODE: 01 JANUARI 2014 - 31 DESEMBER 2014**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.152.078.860.702</b>	<b>Rp 6.337.396.698.105</b>	<b>294,48%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 866.955.379.209	Rp 1.023.817.429.319	118,09%
3	Dana Perimbangan	Rp 699.358.977.675	Rp 709.085.267.689	101,39%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 585.764.503.818	Rp 4.604.494.001.097	786,07%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 4.855.383.657.178</b>	<b>Rp 6.128.937.574.158</b>	<b>126,23%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 3.776.763.817.318	Rp 1.378.459.136.009	36,50%
7	Belanja Modal	Rp 1.076.332.607.295	Rp 4.750.206.918.181	441,33%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 2.287.232.566	Rp 271.519.968	11,87%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 2.703.304.796.476</b>	<b>Rp 208.459.123.947</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	-
12	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	-

Tangerang Selatan, 31 Desember 2014  
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

## 5. Laporan Realisasi Anggaran TA 2015


	<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2015</b> <b>PERIODE: 01 JANUARI 2015 - 31 DESEMBER 2015</b>
---	--

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.555.588.265.237</b>	<b>Rp 2.602.098.780.288</b>	<b>101,82%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.120.064.009.792	Rp 1.228.080.444.405	109,64%
3	Dana Perimbangan	Rp 759.320.314.000	Rp 707.496.059.913	93,17%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 676.203.941.445	Rp 666.522.275.970	98,57%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.310.112.505.939</b>	<b>Rp 2.621.240.243.463</b>	<b>79,19%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 1.910.781.493.965	Rp 1.637.721.069.431	85,71%
7	Belanja Modal	Rp 1.387.159.930.289	Rp 982.977.258.892	70,86%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 12.171.081.685	Rp 541.915.140	4,45%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 754.524.240.702</b>	<b>-Rp 19.141.463.175</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp 754.524.240.702</b>	<b>Rp 754.524.240.702</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp 754.524.240.702	Rp 754.524.240.702	
12	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	

Tangerang Selatan, 31 Desember 2015  
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

## 6. Laporan Realisasi Anggaran TA 2016

	<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2016</b> <b>PERIODE: 01 JANUARI 2016 - 31 DESEMBER 2016</b>
---	--

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.576.372.185.717</b>	<b>Rp 2.664.158.764.561</b>	<b>103,41%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.243.705.400.000	Rp 1.346.240.155.744	108,24%
3	Dana Perimbangan	Rp 874.186.891.950	Rp 847.221.054.205	96,92%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 458.479.893.767	Rp 470.697.554.612	102,66%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.312.068.407.336</b>	<b>Rp 2.888.885.248.322</b>	<b>87,22%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 2.047.101.058.820	Rp 1.839.405.627.276	89,85%
7	Belanja Modal	Rp 1.256.903.901.516	Rp 1.049.322.168.298	83,48%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 8.063.447.000	Rp 157.452.748	1,95%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 735.696.221.619</b>	<b>-Rp 224.726.483.761</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp 735.696.221.619</b>	<b>Rp 735.696.221.619</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp 735.696.221.619	Rp 735.696.221.619	
12	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	

Tangerang Selatan, 31 Desember 2016  
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

## 7. Laporan Realisasi Anggaran TA 2017



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**  
**PERIODE: 01 JANUARI 2017 - 31 DESEMBER 2017**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 2.918.791.015.119</b>	<b>Rp 3.000.278.801.133</b>	<b>102,79%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.448.309.462.781	Rp 1.622.004.639.363	111,99%
3	Dana Perimbangan	Rp 907.352.242.023	Rp 867.028.622.374	95,56%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 563.129.310.315	Rp 511.245.539.396	90,79%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.430.581.892.581</b>	<b>Rp 2.967.633.308.554</b>	<b>86,51%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 2.139.470.451.627	Rp 1.960.015.418.296	91,61%
7	Belanja Modal	Rp 1.289.972.720.550	Rp 1.007.512.392.825	78,10%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 1.138.720.404	Rp 105.497.433	9,26%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 511.790.877.462</b>	<b>Rp 32.645.492.579</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp 511.790.877.462</b>	<b>Rp 511.790.877.462</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp 511.790.877.462	Rp 511.790.877.462	
12	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	

Tangerang Selatan, 31 Desember 2017  
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

## 8. Laporan Realisasi Anggaran TA 2018



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**PERIODE: 01 JANUARI 2018 - 31 DESEMBER 2018**

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp 3.120.025.909.741</b>	<b>Rp 3.211.105.498.451</b>	<b>102,92%</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.494.034.264.514	Rp 1.621.710.653.274	108,55%
3	Dana Perimbangan	Rp 909.630.944.000	Rp 889.139.727.314	97,75%
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 716.360.701.227	Rp 700.255.117.863	97,75%
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp 3.642.462.279.782</b>	<b>Rp 3.271.441.999.424</b>	<b>89,81%</b>
6	Belanja Operasi	Rp 2.414.359.485.497	Rp 2.251.191.724.053	93,24%
7	Belanja Modal	Rp 1.223.758.249.868	Rp 1.019.928.803.901	83,34%
8	Belanja Tak Terduga	Rp 4.344.544.418	Rp 321.471.470	7,40%
<b>9</b>	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-Rp 522.436.370.041</b>	<b>-Rp 60.336.500.973</b>	
<b>10</b>	<b>Pembiayaan Netto Daerah</b>	<b>Rp 522.436.370.041</b>	<b>Rp 522.204.763.514</b>	
11	Penerimaan Pembiayaan	Rp 544.436.370.041	Rp 544.204.763.514	
12	Pengeluaran Pembiayaan	-Rp 22.000.000.000	-Rp 22.000.000.000	

Tangerang Selatan, 31 Desember 2018  
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

### 9. Laporan pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 – 2018

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 110.301,88	Rp 107.444,18	Rp 105.670,00	Rp 108.890,00
B	Pertambangan dan Penggalian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
C	Industri Pengolahan	Rp 4.132.064,27	Rp 4.161.968,36	Rp 4.509.220,00	Rp 4.822.700,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp 33.828,64	Rp 37.887,03	Rp 41.820,00	Rp 44.170,00
E	Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Rp 18.603,22	Rp 18.761,27	Rp 19.810,00	Rp 21.070,00
F	Konstruksi	Rp 4.094.097,01	Rp 4.612.436,93	Rp 5.190.080,00	Rp 5.560.440,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 6.106.598,58	Rp 6.686.872,35	Rp 7.111.780,00	Rp 7.425.980,00
H	Transportasi dan Pergudangan	Rp 890.453,28	Rp 974.314,00	Rp 1.080.820,00	Rp 1.215.240,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 1.045.153,55	Rp 1.098.488,80	Rp 1.165.830,00	Rp 1.256.150,00
J	Informasi dan Komunikasi	Rp 4.218.413,00	Rp 4.988.769,30	Rp 5.536.770,00	Rp 6.440.220,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp 395.504,79	Rp 422.153,56	Rp 455.110,00	Rp 493.490,00
L	Real Estat	Rp 5.647.841,64	Rp 6.179.455,24	Rp 6.897.770,00	Rp 7.463.030,00
M,N	Jasa Perusahaan	Rp 1.002.593,91	Rp 1.093.100,38	Rp 1.200.500,00	Rp 1.334.940,00
O	Adminitrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 353.713,80	Rp 369.872,20	Rp 378.090,00	Rp 416.220,00
P	Jasa Pendidikan	Rp 2.578.307,81	Rp 2.669.497,67	Rp 2.794.590,00	Rp 2.954.230,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 1.572.982,14	Rp 1.638.692,40	Rp 1.663.370,00	Rp 1.708.580,00
R,S,T, U	Jasa Lainnya	Rp 1.014.365,26	Rp 1.032.095,04	Rp 1.100.290,00	Rp 1.146.110,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>Rp 33.214.822,78</b>	<b>Rp 36.091.808,71</b>	<b>Rp 39.251.520,00</b>	<b>Rp 42.411.460,00</b>



Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 111.430,00	Rp 111.470,00	Rp 113.740,00	Rp 114.820,00
B	Pertambangan dan Penggalian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
C	Industri Pengolahan	Rp 5.008.990,00	Rp 4.907.620,00	Rp 4.975.090,00	Rp 5.020.670,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp 44.660,00	Rp 49.450,00	Rp 54.610,00	Rp 58.830,00
E	Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Rp 22.050,00	Rp 23.490,00	Rp 25.230,00	Rp 26.460,00
F	Konstruksi	Rp 5.928.900,00	Rp 6.407.950,00	Rp 6.973.230,00	Rp 7.603.240,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 7.867.360,00	Rp 8.308.070,00	Rp 8.815.320,00	Rp 9.482.250,00
H	Transportasi dan Pergudangan	Rp 1.312.540,00	Rp 1.435.550,00	Rp 1.575.290,00	Rp 1.719.710,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 1.344.210,00	Rp 1.446.220,00	Rp 1.559.480,00	Rp 1.676.310,00
J	Informasi dan Komunikasi	Rp 7.055.110,00	Rp 7.635.750,00	Rp 8.277.910,00	Rp 8.938.490,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp 535.830,00	Rp 583.340,00	Rp 635.410,00	Rp 691.930,00
L	Real Estat	Rp 8.100.960,00	Rp 8.838.960,00	Rp 9.587.410,00	Rp 10.359.190,00
M,N	Jasa Perusahaan	Rp 1.466.890,00	Rp 1.607.310,00	Rp 1.757.110,00	Rp 1.909.270,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 452.510,00	Rp 490.580,00	Rp 528.060,00	Rp 568.770,00
P	Jasa Pendidikan	Rp 3.211.080,00	Rp 3.450.620,00	Rp 3.721.150,00	Rp 4.017.730,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 1.810.750,00	Rp 1.939.680,00	Rp 2.080.500,00	Rp 2.220.930,00
R,S,T, U	Jasa Lainnya	Rp 1.212.340,00	Rp 1.316.940,00	Rp 1.421.240,00	Rp 1.530.100,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>Rp 45.485.610,00</b>	<b>Rp 48.553.000,00</b>	<b>Rp 52.100.780,00</b>	<b>Rp 55.938.700,00</b>

### Lampiran 3 Analisis Data Khusus

#### 1. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2011	Rp 420.663.048.857	Rp 248.034.575.000	169.60%	Sangat Efektif
2012	Rp 576.304.771.005	Rp 365.914.880.365	157.50%	Sangat Efektif
2013	Rp 728.965.301.483	Rp 600.851.230.000	121.32%	Sangat Efektif
2014	Rp 1.023.817.429.319	Rp 866.955.579.209	118.09%	Sangat Efektif
2015	Rp 1.228.080.444.405	Rp 1.120.064.009.792	109.64%	Sangat Efektif
2016	Rp 1.346.240.155.744	Rp 1.243.705.400.000	108.24%	Sangat Efektif
2017	Rp 1.622.004.639.363	Rp 1.448.309.462.781	111.99%	Sangat Efektif
2018	Rp 1.621.710.653.274	Rp 1.494.034.264.514	108.55%	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>125,62%</b>	

#### 2. Rasio Efisiensi APBD

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2011	Rp 1,289,438,935,283	Rp 1,494,990,970,280	86.25%	Tidak Efisien
2012	Rp 1,743,189,975,881	Rp 1,701,879,043,682	102.43%	Tidak Efisien
2013	Rp 91,426,373,932	Rp 2,019,535,444,396	4.53%	Sangat Efisien
2014	Rp 6,128,937,574,158	Rp 6,337,396,698,105	96.71%	Tidak Efisien
2015	Rp 2,621,240,243,464	Rp 2,602,098,780,288	100.74%	Tidak Efisien
2016	Rp 2,888,885,248,322	Rp 2,664,158,764,561	108.44%	Tidak Efisien
2017	Rp 2,967,633,308,554	Rp 3,000,278,801,133	98.91%	Tidak Efisien
2018	Rp 3,271,441,999,424	Rp 3,211,105,498,451	101,88%	Tidak Efisien
<b>Rata-Rata</b>			<b>86,46%</b>	

### Lampiran 4 Statistik Deskriptif Data Penelitian

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Efektivitas PAD	8	108.24	169.60	125.6162	24.08423
Rasio Efisiensi APBD	8	4.53	108.44	87.4863	34.10920
Pertumbuhan Ekonomi	8	6.74	8.81	7.8675	.80528
Valid N (listwise)	8				

## Lampiran 5 Pengujian Prasyarat Analisis

### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.26869727
Most Extreme Differences	Absolute	.154
	Positive	.154
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		.435
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### 2. Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.722	.721		7.939	.001		
	Rasio Efektivitas PAD	.026	.005	.765	5.120	.004	.998	1.002
	Rasio Efisiensi APBD	-.012	.004	-.517	-3.458	.018	.998	1.002

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

### 3. Uji Heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.024	.430		.055	.958
	Rasio Efektivitas PAD	.000	.003	-.018	-.043	.967
	Rasio Efisiensi APBD	.002	.002	.406	.993	.366

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

### 4. Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.943 <sup>a</sup>	.889	.844	.31793	1.996

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD, Rasio Efektivitas PAD

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

## Lampiran 6 Pengujian Hipotesis

### 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.722	.721		7.939	.001
	Rasio Efektivitas PAD	.026	.005	.765	5.120	.004
	Rasio Efisiensi APBD	-.012	.004	-.517	-3.458	.018

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

### 2. Hasil Uji F Simultan

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.034	2	2.017	19.955	.004 <sup>b</sup>
	Residual	.505	5	.101		
	Total	4.539	7			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD, Rasio Efektivitas PAD

### 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi Rasio Efektivitas PAD (X<sub>1</sub>)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 <sup>a</sup>	.622	.559	.53452

a. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas PAD

### 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Rasio Efisiensi APBD (X<sub>2</sub>)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 <sup>a</sup>	.305	.189	.72512

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD

### 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan


Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 <sup>a</sup>	.889	.844	.31793

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi APBD, Rasio Efektivitas PAD

## Lampiran 7 Surat-Surat

### 1. Surat Bimbingan Skripsi

 <b>KEMENTERIAN AGAMA UIN JAKARTA FITK</b> <small>Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia</small>	<b>FORM (FR)</b>	No. Dokumen : FITK-FR-AND-001
		Tgl. Terbit : 1 Maret 2010
		No. Revisi : 01
		Hal : 1/1
<b>SURAT BIMBINGAN SKRIPSI</b>		

Jakarta, 24 April 2019

Nomor : Un.01 /F1/KM.01.3/IV/2019  
Lamp. : -  
Hal : *Bimbingan Skripsi*

Kepada Yth.,

1. Neng Sri Nuraeni, M.Pd.
2. Dr. Sodikin, M.Si.

Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing I/II (materi/teknis) penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ridho Rachman  
NIM : 11150150000079  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial / Konsentrasi Ekonomi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota  
Tangerang Selatan Tahun 2014 – 2018)**

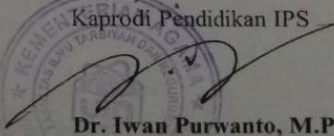
Judul tersebut telah disetujui oleh Jurusan yang bersangkutan pada tanggal 25 Maret 2019, abstraksi/*outline* terlampir. Bapak/Ibu dapat melakukan perubahan redaksional pada judul tersebut. Apabila perubahan substansial dianggap perlu, mohon pembimbing menghubungi program studi terlebih dahulu.

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan berikutnya tanpa surat perpanjangan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

A.n. Dekan,  
Kaprodi Pendidikan IPS

  
**Dr. Iwan Purwanto, M.Pd.**  
NIP.19730424 200801 1 012

Tembusan:  
1. Dekan FITK  
2. Mahasiswa ybs.

## 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

 <b>KEMENTERIAN AGAMA UIN JAKARTA FITK</b> <small>Jl. Dr. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia</small>	<b>FORM (FR)</b>	No. Dokumen : FITK-FR-AKD-082
		Tgl. Terbit : 1 Maret 2010
		No. Revisi : 01
		Hal : 1/1
<b>SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN</b>		

Nomor : B-956/F1/KM.01.3/IV/2019  
 Lampiran : *Outline / Proposal*  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Jakarta, 24 April 2019

Kepada Yth.,

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Tangerang Selatan**  
 Jl. Maruga Raya No. 1, Serua, Ciputat  
 Kota Tangerang Selatan, Banten, 15414

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan bahwa,

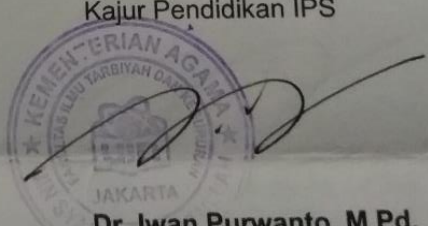
Nama : Ridho Rachman  
 NIM : 11150150000079  
 Jurusan : Pendidikan IPS / Konsentrasi Ekonomi  
 Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi: **Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 – 2018)**

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta yang sedang menyusun Skripsi, dan akan mengadakan penelitian (riset) di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Untuk itu kami mohon Saudara dapat mengizinkan mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian dimaksud. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan,  
 Kajur Pendidikan IPS




**Dr. Iwan Purwanto, M.Pd.**  
 NIP. 197304242008011012

Tembusan:


1. Dekan FITK
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Mahasiswa yang bersangkutan

### 3. Surat Tanda Terima Data

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Raya Maruga No. 1 Serua - Ciputat 15414 Kota Tangerang Selatan

**TANDA TERIMA**  
**BIDANG AKUNTANSI**

DARI :  
UNTUK :  
TANGGAL : 07 Mei 2019  
JAM : 01.47 WIB  
PERIHAL : Permintaan data realisasi anggaran 2014-2018 dan profil Bplero tangsel.

**YANG MENYERAHKAN**  
*(M. F. Nururri)*

**YANG MENERIMA**  
*(Ridho Rachman)*

#### 4. Surat Telah Melakukan Penelitian



### PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Gd.II LT.6-7  
Jl. Maruga Raya Nomor 1 Serua-Ciputat 15414 Kota Tangerang Selatan

Nomor : 071 / 676 / Umpes  
Perihal : Surat Keterangan Selesai  
Melaksanakan Penelitian

Tangerang Selatan, 22 Mei 2019  
Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412  
Indonesia

Menindaklanjuti surat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor:  
Un.01/F/KM.01.3/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 perihal permohonan izin  
penelitian, maka diberitahukan sebagai berikut.

Nama : Ridho Rachman  
NPK : 11150150000079  
Jurusan : Pendidikan IPS/Konsentrasi Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2018)

Terhitung mulai bulan Mei 2019 bahwa mahasiswa tersebut telah selesai  
melaksanakan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
(BPKAD) Kota Tangerang Selatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala  
Drs. Warman Syanudin, MM  
NIP.196308301984031004



### *Lampiran 8 Biografi Penulis*



**Ridho Rachman** lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 1997, anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Baesuni Rahman dan Ibu Mardiyatun. Bertempat tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih VIII A RT. 008 RW. 004 No. 35B, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal

Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Penulis memulai pendidikan di SDN Kemanggisan 05 PG (2003 – 2009), kemudian melanjutkan ke MTs Negeri 35 Jakarta (2009 – 2012), kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 16 Jakarta (2012 – 2015), dan terakhir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan memilih Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Ekonomi.

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti sebagai Staff Keuangan ATK dan PU di Kopma UIN Syahid Jakarta (2016), Divisi Keuangan Simpanan di Kopma UIN Syahid Jakarta (2017), dan Wakil Ketua Umum di Kopma UIN Syahid Jakarta (2018).